

**KUASA EKSKLUSI ATAS TANAH DI KABUPATEN GOWA  
(ANALISIS KASUS PEMBEBASAN LAHAN DI KECAMATAN TOMBOLO  
PAO)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik pada  
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**ALDISYAH**  
**NIM: 30600115051**

**FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

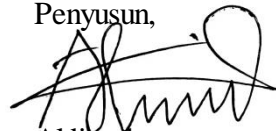
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldisyah  
NIM : 30600115051  
Tempat/Tgl. Lahir : Tombolo Pao, 19 Juni 1997  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat  
Alamat : Jln. Balang-Baru, Kecamatan.Tombolo Pao,Kabupaten.Gowa.  
Judul : Kuasa Eksklusi Atas Tanah di Kabupaten Gowa ( Analisis Kasus Pembebasan Lahan di Kecamatan Tombolo Pao)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 19 Juli 2021

Penyusun,



Aldisyah

NIM: 30600115051

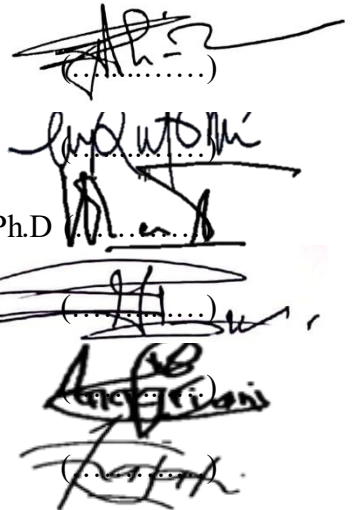
## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Kuasa Eksklusi Atas Tanah di Kabupaten Gowa ( Analisis Kasus Pembebasan Lahan di Kecamatan Tombolo Pao)” yang disusun oleh ALDISYAH, NIM ; 30600115051 mahasiswa Prodi Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 M, bertepatan 9 Zulhijah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Prodi Ilmu Politik, (dengan beberapa perbaikan).

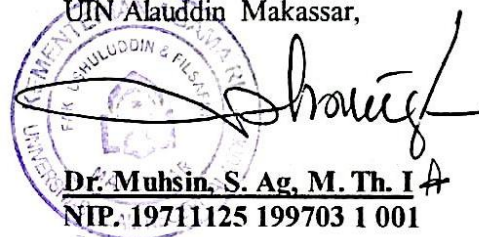
Gowa, 2 Agustus 2021 M  
23 Zulhijah 1442 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Hj. Rahmi., D. M. Ag
Sekretaris	: Nur Utaminingsi., S. Ip, M. Si
Munaqisy I	: Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, MA, Ph.D
Munaqisy II	: Dr. H. Ibrahim M. Pd
Pembimbing I	: Dr. Anggriani Alamsyah, M.Si.
Pembimbing II	: Fajar, S.Sos, M.Si



Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Alauddin Makassar,



**Dr. Muhsin, S. Ag, M. Th. I A**  
NIP. 19711125 199703 1 001

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah swt dengan limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terucap pada lisan kita kepada nabi Muhammad saw bersama seluruh keluarga sanad sahabat, dan semoga selalu tercurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Tulisan ilmiah ini semoga menjadi bahan referensi tematik dan bahan bacaan akademisi dengan judul “Kuasa Eksklusi Atas tanah Dikabupaten Gowa (Analisis Kasus Pembebasan Lahan di Kecamatan tombolo Pao” disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini sangat memerlukan bantuan dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Trimakasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi kedua orang tua yakni ayahanda Aminuddin Dg. Sarro dan Ibunda Aisyah, atas dukungan dan bantuan baik moral-moril hingga dapat menyelesaikan program studi saya. Olehnya itu berkat bantuan dari berbagai pihak baik bantuan secara langsung maupun sebagai bentuk motivasi, penulis perlu berterima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta seluruh jajaran dan stafnya yang telah mencurahkan perhatian dalam memajukan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sehingga memperoleh predikat akreditasi A.

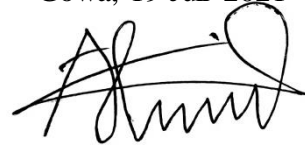
2. Dr. Muhsin, s. Ag, M Th.I Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik. Dr. Hj. Rahmi D, M. Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. Darmawati H, M, HI, DR. Abdullah Thalib, M. Ag, Selaku Wakil Dekan III.
3. Syahrir Karim, M. Si,. Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik
4. Nur Utaminingsi, M. Si. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik
5. Dr. Anggraini Alamsyah, M. Si. Dosen Pembimbing saya sebagai pembimbing I selama penyusunan proposal skripsi ini.
6. Fajar, S. Sos, M. Si. Dosen pembimbing saya sebagai pembimbing II selama penyusunan proposal skripsi ini.
7. Prof. Dr. Muh Saleh Tajuddin, MA, Ph, D. Dosen penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan pada tulisan ini.
8. Dr. Ibrahim, M, Pd. Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan pada tulisan ini.
9. Jajaran Dosen Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan dan wawasan selama proses perkuliahan selama ini.
10. Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, beserta segenap stafnya yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan dalam proses penulisan skripsi ini.

11. Staf Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi selama penulisan skripsi.

12. FORKARI, Home Intelektual Squad, Sahabat Ilmu Politik 2015 dan teman-teman Eks-Star.

Ucapan terima kasih kepada berbagai pihak meskipun belum cukup rasanya untuk membalas semua yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Skripsi ini. Mohon Maaf bila belum sempat saya sebutkan satu persatu, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penuntut Ilmu serta semoga bernilai ibadah dihadapan Allah Swt.

Gowa, 19 Juli 2021



**Aldisyah**

**Nim ; 30600115051**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xii
TRANSLITERASI .....	xiii
ABSTRAK .....	xx
 BAB I     PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
 BAB II    TINJAUAN TEORITIS .....	 15
A. Landasan Teori .....	15
1. Kuasa Eksklusi .....	15
2. Eksklusi Sosial .....	19
3. Analisis Dampak Kebijakan .....	24
B. Kerangka Pikir .....	27

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN .....	28
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian .....	28
B.	Sumber Data .....	29
C.	Teknik Pengumpulan Data .....	30
D.	Instrumen Penelitian .....	32
E.	Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	32
F.	Pengujian Keabsahan Data .....	35
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	36
A.	Gambaran Umum Kabupaten Gowa .....	36
1.	Keadaan Geografis .....	36
2.	Wilayah Administratif .....	37
3.	Pertanahan Kabupaten Gowa .....	39
B.	Profil Kecamatan Tombolo Pao .....	40
1.	Geografis Kecamatan Tombolo Pao .....	40
2.	Keadaan Penduduk dan Lahan Hutan Tombolo Pao .....	41
C.	Kronologi Pembebasan Lahan Hutan Tombolo Pao .....	50
D.	Analisis Kuasa Eksklusi Lahan Hutan di Kecamatan Tombolo Pao .....	55
E.	Resistensi Masyarakat Di Kecamatan Tombolo Pao .....	64
1.	Resistensi Penolakan Melalui Media .....	65
2.	Resistensi Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Gowa .....	68
F.	Polarisasi Dampak Sosial Eksklusi Lahan Hutan .....	73
1.	Dampak Pembebasan Lahan Hutan .....	74
2.	Dampak Eksklusi Sosial Masyarakat .....	79



BAB V	PENUTUP .....	83
	A. Kesimpulan .....	83
	B. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....		87
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....		89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....		97

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Huruf Bahasa Arab .....	vii
Tabel 1.2 Vokal Tunggal Bahasa Arab .....	viii
Tabel 1.3 Maddah .....	xiv
Tabel 1.4 Luas Wilayah Desa/Kecamatan Kabupaten Gowa .....	38
Tabel 1.5 Data Penduduk Kecamatan Tombolo Pao .....	42
Tabel 1.6 Mata Pencarian Masyarakat Tombolo Pao .....	44
Tabel 1.7 Luas Lahan Di Kabupaten Gowa PerKecamatan .....	46
Tabel 1.8 Luas Hutan Tanah Objek Agraria (TORA) Kab. Gowa .....	47
Tabel 1.9 Pendidikan Kecamatan Tombolo Pao .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Gowa .....	37
Gambar 2.2 Peta Kecamatan Tombolo Pao .....	40

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Kerangka Pikir .....	27
--------------------------------	----

## TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

**1. Tabel 1.1 Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengantitikdidas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengantitikdidas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitikdibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengantitikdibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengantitikdibawah)

ع	‘ain	‘	apostrofterbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Vokal**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
أ	damamah	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathahdanyā	Ai	a dan i
وَ	fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

**Tabel 1.3 Maddah**

Harakatdan Huruf	Nama	Hurufdantanda	Nama
يَ... / أَ....	Fathahdanalifatauyā	A	a dangaris di atas
يِ	Kasrahdanyā	Ī	i dangaris di atas
وِ	ḍammahdanwau	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

مات : *māta*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

#### 4. *Tāmarbūṭah*

Transliterasi untuk *tā*'marbūṭah ada dua yaitu: *tā*'marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā*'marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā* marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā*' *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة الفا ضلة : *al-madīnah al-fāḍilah*

الحكمة : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربنا : *rabbanā*

نجينا : *najjainā*

الحق : *al-ḥaqq*

نعم : *nu"ima*

عدو : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsyiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang



ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).

Contoh :

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلاّلة : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al- bilādu*

### 7. *Hamzah.*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تأمرون : *ta’murūna*

النوع : *al-nau’*

شيء : *syai’un*

أمّرت : *umirtu*

### 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *dīnullāh* دِينَ الله

Adapun *tā’marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

hum fīrahmatillāh في رحمة اللههم

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahūwata'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hījah
M	: Masehi

SM : Sebelum Masehi  
l. : Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja)  
w. : Wafattahun  
QS.../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4  
HR : Hadis Riwayat

## ABSTRAK

**Nama : Aldisyah**  
**NIM : 30600115051**  
**Judul : KUASA EKSKLUSI ATAS TANAH DI KABUPATEN GOWA  
(ANALISIS KASUS PEMBEBASAN LAHAN DI KECAMATAN  
TOMBOLOPAO)**

---

Skripsi ini membahas tentang kuasa eksklusi atas tanah dan dampak kuasa eksklusi kasus pembebasan lahan di Kecamatan Tombolo pao. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : a.) Untuk mengetahui bagaimana kuasa eksklusi atas tanah, dalam Kasus Pembebasan lahan di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. b.) Untuk mengetahui bagaimana dampak sosial kuasa eksklusi atas tanah, dalam kasus pembebasan lahan di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dianalisis dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumen-dokumen dengan menggunakan teori kuasa eksklusi, eksklusi sosial, dan analisis dampak kebijakan, penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kuasa eksklusi dan dampak pembebasan lahan Hutan yang mengakibatkan resistensi dalam masyarakat, masyarakat dan pemuda setempat melakukan aksi penolakan media dan mengusulkan rapat dengar pendapat (RDP) di pemerintah kabupaten Gowa, atas perambahan dan pembebasan hutan dikecamatan Tombolo Pao sebagai bentuk perlawanan, salah satu oknum kesatuan pengelola hutan (KPH) Kabupaten Gowa, di duga mengarahkan oknum untuk melakukan perambahan hutan serta melakukan pembebasan lahan hutan yang tidak sesuai prosedur dalam aturan reforma agraria, tanah objek agraria (TORA), yang tersebut menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat. Dampak yang ditimbulkan atas perambahan yakni konflik horizontal antara oknum dan masyarakat khususnya didesa tonasa yang berujung adanya pengusiran dari masyarakat local ke oknum serta ditangkapnya salah satu oknum dari pihak Kesatuan pengolahan hutan “KPH”, oknum salah satu masyarakat di Kecamatan Tinggi Moncong, oknum Lembaga swedaya masyarakat (LSM) serta dimutasinya kepala kesatuan pengelola hutan (KPH) kabupaten gowa atas prosedural penyadapan getah pinus dan banyaknya permasalahan terkait hutan, pembebasan lahan hutan mengakibatkan kerusakan hutan dimana berakibat kepada hulu sungai mengalami debit air yang kecil diwaktu kemarau seperti sungai tanggara, sungai allu dan beberapa sungai kecil, dikecamatan Tombolo Pao yang mana kita mengetahui bersama bahwa masyarakat khususnya di dataran tinggi di Tombolo Pao sangat memerlukan pasokan air untuk tanaman sayuran, serta rusaknya ekosistem hewan yang berada pada kawasan hutan pembebasan, Dari Implikasi; pada tataran teoritis diatas diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah tentang kuasa eksklusi dan dampak kontrol pemerintahan yang menimbulkan resistensi. Sedangkan dalam tataran implikasi praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintahan agar tidak terjadi lagi dampak dan resistensi dalam masyarakat.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wacana dan ruang publik adalah situs tempat perjuangan kuasa digelar serta tempat di mana identitas dan golongan dikonstruksi melalui relasi kepentingan. Seperti yang dikatakan Foucault bahwa, relasi kuasa adalah permainan strategis antara pihak-pihak yang merdeka, dalam konsepsi ini, kuasa menentukan relasi antar mitra.<sup>1</sup>

Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil. Karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke

---

<sup>1</sup> Yudi Latif, *Intelegensia Muslim Dan Kuasa; Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20* (Jakarta: Democracy Project, 2012), h. 37.

dalam seluruh jalinan sosial. Kekuasaan itu beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapapun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, dan lembaga-lembaga. Dan sifatnya menormalisasikan susunan-susunan masyarakat menjadi relasi kuasa.<sup>2</sup>

Hubungan kuasa menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kuasa dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan. Kekuasaan lahir karena adanya kemiskinan dan keterbelakangan, kuasa juga identik dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang direkrut, penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam suatu masyarakat, terutama pada kelimpahan sumber daya alam (SDM) berupa lahan sangat sentral bagi kekuasaan untuk memberi pengaruh atas sumber daya alam lahan<sup>3</sup>. Kekuasaan pada masa sekarang sudah menjadi topik mendasar didalam era dimana hampir ditiap negara dan interdependensi. Permasalahan disparitas kapabilitas dalam kekuatan yang selama ini menjadi penyebab timbulnya permasalahan yang rentan persaingan/perlombaan dan permasalahan. Seperti halnya kemampuan memainkan peranan untuk mengambil keuntungans sebesar-besarnya seperti lahan.<sup>4</sup>

Menurut Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li dalam bukunya Kuasa Eksklusi adalah tindakan yang mutlak. Ia tidak akan dapat menggarap lahan

---

<sup>2</sup> Muji Sutrisno, *Hendar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 146.

<sup>3</sup> Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 1995) h. 97

<sup>4</sup> Joseph M. Grieco, *Cooperation Among Nations: Europe, America, and Non-Tariff Barriers to Trade*, (Cornell University Press) h. 10.

pertanian tanpa jaminan bahwa orang lain tidak merebut lahan atau mencuri hasil panennya lebih jauh, mereka menjelaskan proses eksklusi dan kuasa-kuasa yang bekerja di dalamnya.<sup>5</sup>

Hall, Hirsch, dan Li mendefinisikan eksklusi sebagai tindakan di mana pihak-pihak tertentu dicegah untuk mendapatkan manfaat dari suatu hal khususnya tanah, mereka berpandangan bahwa lawan dari eksklusi adalah akses, bukan inklusi yang sering digunakan dalam berbagai kajian. Definisi tersebut berangkat dari pendapat Ribot dan Peluso yang mendefinisikan “akses” sebagai kemampuan mendapat manfaat dari sesuatu.<sup>6</sup> Hall, Hirsch, dan Li membagi proses eksklusi menjadi tiga. Pertama, bagaimana pihak tertentu memelihara akses atas tanah yang mereka punya dan mencegah akses calon pengguna lain; kedua, bagaimana pihak tertentu yang memiliki akses atas tanah kehilangan akses tersebut; ketiga, bagaimana pihak tertentu yang tidak memiliki akses, dicegah untuk mendapatkan akses. Bagi mereka, eksklusi mesti dipahami lebih luas dari konsep kepemilikan pribadi. Eksklusi tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya hak resmi, tetapi oleh berbagai kekuasaan yang dapat mencegah orang mendapatkan akses dari tanah.<sup>7</sup>

Berangkat dari konsep tersebut, mereka kemudian menjelaskan empat kuasa yang membentuk eksklusi. Kuasa-kuasa tersebut merupakan induk dari analisis pertanahan. Walaupun mereka hanya menggunakan empat kuasa eksklusi, bukan

---

<sup>7</sup> Derek Hall, Philip Hirsch & Tania Murray Li, *Kuasa eksklusi, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2020), h. 12.

berarti kuasa-kuasa lain tidak penting, bahkan kuasa lain juga ikut bekerja<sup>8</sup>. Serta penting pula diingat bahwa kuasa-kuasa tersebut saling berhubungan dalam suatu proses eksklusi. Kuasa yang bekerja adalah peraturan, paksaan, dan legitimasi. Kuasa pasar bekerja dalam isu yang erat kaitannya dengan kehutanan atau konservasi. Misalnya korporasi pembebasan lahan dengan wacana peduli lingkungan membuat mereka seolah menjadi pahlawan lingkungan.<sup>9</sup>

Kuasa peraturan dominan dalam penetapan sebuah kawasan menjadi hutan adalah kewenangan pemerintah. Sementara pemaksaan, sebagai inti dari peraturan juga terjadi. Pemaksaan juga dapat terjadi ketika dilakukan dengan tersirat dan dari jarak yang cukup jauh.<sup>10</sup>

Dalam pemerintahan Jokowi-Amin yang meliputi berbagai mempercepat pelaksanaan redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan guna memberikan peluang rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan/aset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, pemanfaatan dan produksi atas tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial sehingga lebih produktif, percepatan legalisasi (Sertifikasi) atas tanah tanah milik rakyat dan tanah wakaf, sehingga memiliki kepastian hukum dan mencegah munculnya sengketa tanah. Dinyatakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, salah satunya adalah dengan mendorong reforma agraria

---

<sup>8</sup> Derek Hall, Philip Hirsch, & Tania Murray Li, *Kuasa ekslusi, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2020), h. 330.

<sup>9</sup> Derek Hall, Philip Hirsch, & Tania Murray Li, *Kuasa ekslusi, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2020), h. 139.

<sup>10</sup> Derek Hall, Philip Hirsch, & Tania Murray Li, *Kuasa ekslusi, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara* (Yogyakarta: INSISTPress, 2020), h. 29.



melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset seluas 9 juta hektar. restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria. Secara formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan berakar dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk penggunaan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”, kemudian dituntaskan secara kokoh didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).<sup>11</sup>

Adapun ayat yang menjelaskan tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan ialah, QS. Al- A’Raaf Ayat/7:58.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

*Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.*<sup>12</sup>

Kuasa eksklusi dalam Pertahanan permasalahan agraria terus meningkat menjadi tontonan pilu yang tidak kunjung berlalu, kelimpahan dan kekurangan sumber daya alam (sumber daya laut) sering terjadi meningkatkan resiko

<sup>11</sup> Muhammad Yamin, Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Mandar Maju, Cetakan I, 2008) h.1.

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Menyamping*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015. h 231

Permasalahan sosial, potensi sumber daya pertanian di Kecamatan Tombolo Pao yang melimpah dan subur, sehingga menyebabkan sering terjadinya perebutan lahan di antaranya pemerintah, oknum, masyarakat lokal, dan masyarakat luar kecamatan Tombolo Pao. Buckles terdapat empat penyebab timbulnya permasalahan pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya pertanian yaitu: pertama, adanya perbedaan akses antar aktor sosial dan/atau institusi terhadap pusat kekuasaan. kedua, aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan ekosistem di suatu wilayah dapat menimbulkan masalah lingkungan di wilayah lainnya. ketiga, adanya peningkatan kelangkaan sumber daya alam yang disebabkan oleh terjadinya perubahan lingkungan, pertumbuhan penduduk dan peningkatan permintaan, serta pola pendistribusian yang tidak merata. keempat, sumber daya alam dipergunakan oleh manusia bukanlah semata mata sebagai material yang diperebutkan, namun juga untuk mendefinisikan hidupnya pada lahan<sup>13</sup>. Penyebab Permasalahan diatas ada kemiripan dengan sebab-sebab terjadinya kekuasaan antara kelompok masyarakat local dengan pemerintah, maupun antara masyarakat local dan masyarakat luar Kecamatan Tombolo Pao, dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di bidang lahan.

Kuasa di antara para aktor yang tidak setara merupakan dampak dari politisasi lingkungan politisasi lingkungan adalah adanya pusat kekuasaan atau dominasi aktor negara dan masyarakat terhadap sumber daya alam. Akibat dari dominasi tersebut,

---

<sup>13</sup> K. A. Buckle, *Ilmu Pangan* (Surabaya:UIP 2020) h. 23.

muncul analisis pertama, biaya dan manfaat yang berhubungan dengan perubahan lingkungan didistribusikan di antara berbagai aktor secara tidak merata. kedua, distribusi pemanfaatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya berbagai ketimpangan sosial ekonomi. ketiga , terjadinya jual-beli tanah akhirnya<sup>14</sup>. Permasalahan pembebasan lahan, permasalahan penduduk lokal yang mengklaim sebagai pewaris tanah nenek moyang yang semuanya ini masih sebagian kecil dari permasalahan tentang pembebasan lahan. Permasalahan lahan terus meningkat menjadi tontonan pilu yang tidak kunjung berlalu, seperti permasalahan tanah yang terjadi di kecamatan Tombolo Pao seperti (saling mengklaim atas tanah, pembagian tanah yang tidak merata serta pengklaiman penduduk setempat sebagai ahli waris tanah dari leluhurnya) Adapun ayat yang menjelaskan tentang kerusakan lingkungan akibat pembebasan lahan yakni QS. Ar. Rum Ayat/ 30:41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>15</sup>*

Di sini jelas bahwa kerusakan itu adalah kerusakan yang akibatnya menimpa pada manusia yaitu pada desa atau kota yang mereka bangun melalui ‘tangan-tangan’

---

<sup>14</sup> Korespondensi Penulis: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor Kampus IPB Dramaga, Jalan Kamper, Babakan, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

<sup>15</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahannya Disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat*, (Jakarta: Darus Sunnah) h. 67.

mereka. Namun manusia melakukan penyelewengan terhadap tugasnya sebagai khalifah di bumi. Manusia tak lagi memelihara lingkungan, melakukan perbuatan yang menyeleweng, saling bermusuhan, saling hianat, saling adu domba satu dengan yang lain. Akhirnya terjadilah bencana itu, yang oleh Allah di akhir ayat ini dijadikan sebagai warning (peringatan) bagi manusia. Agar manusia kembali ke jalan yang benar sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan alam semesta.

Ketegangan sosial yang tengah terjadi di Kecamatan Tombolo Pao, Berakibat pada kerusakan hutan akibat pembebasan lahan, sebagai mana pasokan air pada musim kemarau sudah minim, konflik tanah pembebasan, adanya jual beli tanah, pengklaiman masyarakat setempat atas tanah nenek moyang, serta konflik antar masyarakat sekitar, kondisi saat ini ditentukan imbas dari relasi kuasa dalam pembagian tanah di Kecamatan Tombolo Pao, dimana indikasi aparat pemerintah kecamatan dan masyarakat luar dari Kecamatan Tombolo Pao mendapatkan lahan pembebasan.

Kecenderungan relasi kuasa yang berimplikasi pada eksklusi sosial mewarnai di dalam masyarakat, relasi kuasa dan dominasi atas politik di Kecamatan akan mengakibatkan eksklusi sosial yang sangat tinggi. Eksklusi sosial terhadap kelompok-kelompok masyarakat kecil tertentu yang tidak memiliki kedekatan relasi dengan pemerintah setempat akan berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat tentunya. Oleh sebab itulah, menunjukkan perkembangan yang tidak signifikan

karena dalam setiap kepentingan memiliki tendensi yang tidak sama, karena kerasnya politik kecamatan dan relasi eksklusi yang berujung pada eksklusi sosial dan penghambatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, eksklusi sosial atas tanah yang terjadi mendorong secara massif lahirnya kelompok-kelompok melawan yang sebagian menjadi kelompok dari pemuda, masyarakat setempat dan aktivis lingkungan, yang prihatin atas kasus ini, bahkan beberapa dari individu atau kelompok yang mengalami pengucilan sosial akibat diskriminasi, stigma dan eksploitasi politik.<sup>16</sup>

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Fokus penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Kuasa Eksklusi atas tanah dan kondisi sosial dalam masyarakat sebagai akibat dari pembebasan lahan di Kecamatan Tombolo Pao, wujud kuasa substantif yang malah mengakibatkan kegaduhan dalam masyarakat. Adapun poin tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Eksklusi
- b. Resistensi dampak Sosial

### **2. Deskripsi fokus**

---

<sup>16</sup> M. Fadhil Nurdin, *Eksklusi Sosial Dan Pembangunan*, (Manado: Universitas Padjadjaran) h. 12.

Berikut deskripsi tentang fokus penelitian ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan sehingga tidak terjadi salah paham dalam memahami penelitian ini, maka penulis mendeskripsikan pengertian dari beberapa variabel yang dianggap penting dalam memahami penelitian ini :

- a. Eksklusi sebagai tindakan di mana pihak-pihak tertentu dicegah untuk mendapatkan manfaat dari suatu hal khususnya tanah.
- b. Resistensi Dampak Sosial merupakan sebuah keadaan sikap bertahan, berusaha melawan, dan menentang atau upaya yang dilakukan oposisi atau Sebuah ketegangan yang terjadi dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik, membuat kehidupan dalam masyarakat menjadi tidak lagi harmonis, Serta dampak social yang ditimbulkan.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi. Rumusan masalah ini terbagi atas dua, pokok masalah yaitu “Bagaimana Kuasa Eksklusi Atas Tanah Di Kabupaten Gowa (Analisis Kasus Pembebasan Lahan Di Kecamatan Tombolo Pao)?” dan sub-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kuasa eksklusi atas tanah, dalam kasus pembebasan lahan di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.
2. Bagaimana Resistensi dampak social kuasa eksklusi atas kasus pembebasan lahan di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

#### D. Tinjauan Pustaka

Menilai apakah suatu penelitian layak atau tidak untuk diteliti, diperlukan sebuah kajian pustaka seperti berikut :

**Derek Hall, Philip Hirsch, & Tania Murray Li** dalam bukunya “Kuasa Eksklusi “Dilema Pertanahan di Asia Tenggara” bahasan dalam buku ini mengulas tentang siapa yang dapat dan dicegah untuk mengakses tanah mendasari berbagai konflik sosial dan politik di Asia Tenggara. Buku ini menelaah proses-proses kunci melalui mana pergeseran-pergeseran hubungan pertanahan berlangsung: alokasi tanah negara dan penyediaan hak-hak atas tanah, perluasan kawasan lindung, demam komoditas budidaya, alih fungsi lahan pertanian, pencegahan akses orang-orang dekat, serta mobilitas klaim pertanahan dalam terma identitas dan keterikatan dengan tempat.<sup>17</sup>

**Shohebul Umam** dalam penelitian nya mengenai “Relasi Kuasa dan kesejahteraan sosial menjelaskan telaah kritis eksklusi social masyarakat dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat lintas sektor<sup>18</sup>.

**Ahmad Nashih Luthfi**, dalam jurnalnya, “Eksklusi dan Inklusi sebagai Dua Mata Uang” menjelaskan tentang problem agrarian di era teknologi dan komersiliasi perubahan politik, ekonomi dan penggunaan teknologi di desa yang melakukan

---

<sup>17</sup> Tania Murray Li Philip Hirsch, & Derek Hall, *Kuasa eksklusi, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2020). h.17

<sup>18</sup> Shohebul Umam, “ *Relasi Kuasa Dan Kesejahteraan Sosial (Telaah Kritis Terhadap Eksklusi Sosial Masyarakat Di Desa Bragung Gulung-Gulung Sumenap Dan Implikasi Terhadap Kesejahteraan masyarakat lintas Sektor)*”, *Skripsi* (Yogyakarta:Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Sunankali Jaga Yogyakarta, 2017) h. 45

eksklusi akses tanah sebagai bagian dari akumulasi capital khususnya di dataran tinggi yang terdiferensi dalam kelas penguasaan tanah satu dengan yang lainnya terikat dalam hubungan penggarapan tanah, bagi hasil, sewa dan gadai tanah, kredit hutang piutang, yang tak jarang berujung pada proses pelepasan tanah bagi kelas lemah, dan akumulasi pada pihak lainnya.<sup>19</sup>

**Ariationo Nugroho, Suharno dan Tullus Subrono** dalam bukunya “Relasi Kuasa (Dalam Strategi Pertahanan di Kecamatan Prigelan)”, bahasan dalam buku ini mengulas tentang relasi kuasa dikecamatan menerapkan Power Over Relation otonomi daerah, mobilisasi sumberdaya, dan strategi pertahanan di kecamatan (penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, keadilan serta kesadaran kritis dibidang agrarian).<sup>20</sup>

**Sintaningrum,** dalam jurnalnya, (pengaruh implementasi kebijakan pertanahan terhadap struktur penguasaan tanah dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani di kabupaten Garut dan Subang), menjelaskan tentang pengaruh implementasi kebijakan pertanahan dan dampak terhadap kesejahteraan petani yang meliputi kepentingan pihak-pihak terpengaruh kebijakan, jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, derajat perubahan yang diinginkan, kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat dan pengaruh dampak yang ditimbulkan

---

<sup>19</sup> Ahmad Nashih Luthfi, “*Eksklusi dan Inklusi Sebagai Dua Sisi Mata Uang*”, Jurnal (Bhumi, 2013).

<sup>20</sup> Aristiono Nugroho, Suharno & Tullus Subroto, “Relasi Kuasa ( Dalam Strategi Pertanahan Didesa Prigelan)”, (STPN Press, 2016) , h .204



dalam penguasaan tanah seperti konflik horizontal masyarakat, terganggunya ekosistem hewan dan kelangsungan air, dari dampak kebijakan pertanahan.<sup>21</sup>

Dari beberapa penjelasan penelitian diatas baik secara perorangan maupun kelompok belum ada yang secara tuntas membahas tentang “Bagaimana Kuasa Eksklusi Atas Tanah Di Kabupaten Gowa (Analisis Kasus Pembebasan Lahan Di Kecamatan Tombolo Pao)” meskipun dari sumber tersebut telah ada yang menyinggung kuasa eksklusi atas tanah, akan tetapi mengenai kuasa eksklusi pertanahan belum menjawab secara keseluruhan masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut dan pengetahuan secara mendalam tentang hal tersebut.

### ***E. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah secara eksplisit dan memberikan solusi terkait fenomena judul yang diangkat, serta manfaat secara teoritis maupun praktis khusus pada daerah yang diteliti yaitu Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

#### **1. Tujuan penelitian.**

- a. Untuk mengetahui bagaimana kuasa eksklusi atas tanah, dalam Kasus Pembebasan lahan di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

---

<sup>21</sup> Sintaningrat, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertanahan Terhadap Struktur Penguasaan Tanah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Garut dan Subang”, *Jurnal* (Kependudukan Padjadjaran, 2018).

- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak sosial kuasa eksklusi atas tanah, dalam kasus pembebasan lahan di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

## **2. Manfaat Penelitian.**

### **a. Manfaat pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dan memberikan penjelasan tentang tinjauan kuasa eksklusi atas tanah, dalam kasus pembebasan lahan di Kecamatan Tombolo Pao, kabupaten Gowa.

### **b. Manfaat bagi Masyarakat.**

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana dampak sosial kasus pembebasan lahan di Kecamatan Tombolo Pao, kabupaten Gowa.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Kuasa Eksklusi

Konsep kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan.<sup>22</sup> kekuasaan sangat orisinal. Kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil.<sup>23</sup> Karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan sosial. Kekuasaan itu beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapapun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga. Dan sifatnya menormalisasikan susunan-susunan Masyarakat.

Hall, Hirsch, dan Li, mendefinisikan eksklusi sebagai tindakan di mana pihak-pihak tertentu dicegah untuk mendapatkan manfaat dari suatu hal khususnya tanah<sup>24</sup>. Mereka berpandangan bahwa lawan dari eksklusi adalah akses, bukan inklusi yang sering digunakan dalam berbagai kajian. Definisi tersebut berangkat dari pendapat

---

<sup>22</sup> Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 146.

<sup>23</sup> Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 150

<sup>24</sup> Derek Hall, Philip Hirsch, & Tania Murray Li, *Kuasa eksklusi, Dilema Pertanian di Asia enggara*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2020), h. 12

Ribot dan Peluso yang mendefinisikan “akses” sebagai kemampuan mendapat manfaat dari sesuatu<sup>25</sup>.

Hall, Hirsch, dan Li, membagi proses eksklusif menjadi tiga. Pertama, bagaimana pihak tertentu memelihara akses atas tanah yang mereka punya dan mencegah akses calon pengguna lain; kedua, bagaimana pihak tertentu yang memiliki akses atas tanah kehilangan akses tersebut; ketiga, bagaimana pihak tertentu yang tidak memiliki akses, dicegah untuk mendapatkan akses. Bagi mereka, eksklusif mesti dipahami lebih luas dari konsep kepemilikan pribadi, Eksklusif tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya hak resmi, tetapi oleh berbagai kekuasaan yang dapat mencegah orang mendapatkan akses dari tanah<sup>26</sup>.

Berangkat dari konsep tersebut, mereka kemudian menjelaskan empat kuasa yang membentuk eksklusif. Kuasa-kuasa tersebut merupakan induk dari analisis pertanahan<sup>27</sup>. Jadi, walaupun mereka hanya menggunakan empat kuasa eksklusif, bukan berarti kuasa-kuasa lain tidak penting, bahkan kuasa lain juga ikut bekerja, serta penting pula diingat bahwa kuasa-kuasa tersebut saling berhubungan dalam suatu proses eksklusif, yang berangkat dari pola-pola kuasa yang bisa merugikan masyarakat kecil.

Empat kuasa yang membentuk eksklusif yakni:

---

<sup>26</sup> Derek Hall, Philip Hirsch & Tania Murray Li, *Kuasa eksklusif, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2020), h. 12 .

<sup>27</sup> Derek Hall, Philip Hirsch & Tania Murray Li, *Kuasa eksklusif, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2020), h. 330.

#### a. Kuasa pertama

Adalah peraturan yang memiliki komponen seperti menentukan batas petak tanah; jenis penggunaan tanah yang diperbolehkan atau dilarang; menentukan jenis-jenis klaim kepemilikan atau hak pemanfaatan yang dapat diberikan untuk berbagai macam status tanah; serta menentukan individu, kelompok, atau instansi mana yang mempunyai hak atas lahan tertentu<sup>28</sup>. Kuasa peraturan juga bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat ada yang menentukan akses tanah dan eksklusi di wilayahnya, pun dengan lembaga internasional seperti UNESCO<sup>29</sup>.

#### b. Kuasa kedua

Adalah paksaan yang merupakan inti dari peraturan. Namun, kadang kala aparat penegak hukum atau pun pejabat negara bertindak melebihi kewenangannya terhadap suatu lahan tertentu. Atau bertindak brutal demi mengamankan kepentingan swasta. Namun, penduduk miskin atau petani kecil juga bisa melakukan suatu paksaan, misalnya menduduki kawasan secara paksa, atau membakar lahan dalam sengketa dengan petani lain di tingkat desa.<sup>30</sup>

#### c. Kuasa ketiga

---

<sup>28</sup> Derek Hall, Philip Hirsch, & Tania Murray Li, *Kuasa eksklusi, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2020), h. 26.

<sup>29</sup> Derek Hall, Philip Hirsch & Tania Murray Li, *Kuasa eksklusi, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2020), h. 27.

<sup>30</sup> Derek Hall, Philip Hirsch & Tania Murray Li, *Kuasa eksklusi, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2020), h. 28.

Adalah kuasa pasar yang telah menjadi kekuatan besar, namun, selalu disokong oleh kuasa peraturan, paksaan, dan legitimasi. Pemerintah senantiasa mencampuri urusan pasar dalam rangka menciptakan kegiatan ekonomi dan memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu. Kuasa pasar juga dapat kita jumpai dalam demam komoditas, Kadang pula pemerintah terlibat dalam penjualan tanah-tanah di dalam kawasan konservasi, serta pembangunan sektor pariwisata.<sup>31</sup>

#### d. Kuasa Keempat

Adalah kuasa legitimasi yang dapat dipahami sebagai alasan pembenaran atas kondisi sesungguhnya atau ideal yang merujuk pada nilai-nilai moral. Kuasa ini berperan penting dalam mendukung berbagai bentuk eksklusi. Argumen “apa yang layak dan benar” menjadi landasan normatif suatu eksklusi, Misalnya, wacana tata kelola tanah melalui pasar bebas dapat digunakan untuk eksklusi<sup>32</sup>, bisa berupa sertifikasi tanah. Namun, wacana tertentu selalu dapat dilawan dengan wacana yang lain atau kadang saling bertentangan. Misalnya wacana penguasaan lahan berbasis adat kadang berbenturan dengan wacana reforma agraria<sup>33</sup>. Seperti halnya beberapa kasus yang ada di Indonesia yang melibatkan wacana reforma agraria.

---

<sup>31</sup> Derek Hall, Philip Hirsch & Tania Murray Li, *Kuasa eksklusi, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2020), h. 29.

<sup>32</sup> Derek Hall, Philip Hirsch & Tania Murray Li, *Kuasa eksklusi, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2020), h. 31.

<sup>33</sup> Derek Hall, Philip Hirsch & Tania Murray Li, *Kuasa eksklusi, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2020), h. 307.

## 2. Eksklusi Sosial

Eksklusi sosial mempunyai makna yang sama dengan kemiskinan pendapatan, merujuk pada pekerja yang tidak dibayar atau orang yang bekerja dengan pendapatan yang rendah<sup>34</sup>. Namun dalam konteks yang lebih luas, eksklusi sosial dapat didefinisikan sebagai proses menghalangi atau menghambat individu, keluarga, dan kelompok dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya di dalam sebuah ritual sosial yang utuh.

Proses ini merupakan satu konsekuensi logis dari kemiskinan, dan penghasilan yang rendah. Tetapi juga bisa berakar dari faktor yang lain, seperti diskriminasi, minoritas, pendidikan yang rendah, merosotnya kualitas lingkungan, pun juga dengan konstruksi politik, juga memiliki potensi sebagai arus yang dapat melahirkan eksklusi sosial. Oleh sebab itulah dalam telaah yang dilakukan oleh Pierson, melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa periode waktu kehidupan terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian besar masyarakat<sup>35</sup>.

Setidaknya ada lima kekuatan yang mendorong terjadinya proses eksklusi sosial yaitu: a. kemiskinan dan penghasilan rendah, b. tidak adanya akses ke pasar

---

<sup>34</sup> Andre S Utama dkk, "Review" *Social Exclusion: a Concept in Need of Definition*. Robin Peace, *Jurnal* (Studi Pemerintahan Vol.2 No.1 Februari 201).

<sup>35</sup> Jhon Pierson, *Tackling Social Exclusion* (Lodon and New York: Routlage, 2002), h. 135.

kerja, c. tidak adanya support atau dukungan dari jejaring sosial, d. efek dari kawasan dan lingkungan sekitar, e. terputus dari layanan.<sup>36</sup>

Wacana tentang eksklusi dalam perjalanannya tidak bisa dilepaskan dari dinamika sejarah dan kondisi Prancis pada tahun 1970. Rene Lenoir, sekretaris negara untuk urusan aksi sosial pada pemerintahan Prancis tahun itu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa keprihatinannya terhadap marjinalisasi yang dialami beberapa kelompok masyarakat dari arus utama mainstream kehidupan bangsa Prancis, mampu membuka gairah dan khazanah pemikiran para pemerhati sosial dalam melihat bukan masalah kemiskinan sebagai kondisi sosial tetapi faktor-faktor yang memberi kontribusi terhadap proses terjadinya deprivasi dan kemiskinan.

Jadi dapat dikatakan konsep eksklusi menjadi sebuah paradigma yang memberikan kerangka berpikir lebih komprehensif untuk memahami deprivasi dan kemiskinan pada banyak kelompok dalam masyarakat. Sebagai sebuah payung besar, untuk memahami masalah ini, konsep eksklusi sosial memang bisa mencakup semua elemen masyarakat yang mengalami deprivasi. Lenoir sendiri menyatakan bahwa satu diantara sepuluh orang Prancis mengalami eksklusi sosial.<sup>37</sup>

Jadi pada dasarnya, konsep eksklusi bersifat multidimensional ia hanya menjadi kacamata untuk melihat ketimpangan dalam masyarakat, dimana banyak kelompok yang termarginalisasi dan kondisi kehidupan mereka tidak mendapat

---

<sup>36</sup> Jhon Pierson, *Tackling Social Exclusion*, (London and New York: Routledge, 2002), h. 135.

<sup>37</sup> Rusydi Syahra, *Eksklusi Sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan*, Jurnal (Masyarakat dan Budaya, edisi khusus 2010), h. 5-7.



perhatian karena solidaritas yang menjadi salah satu ciri budaya mengalami erosi. Tetapi ketika diadopsi oleh negara-negara eropa barat dan Amerika konsep eksklusi sosial mengalami perluasan makna, diberi interpretasi sesuai kondisi ekonomi, sosial, dan kultural dari masing-masing negara<sup>38</sup>.

Kelompok-kelompok sosial yang retak akibat dari kerasnya pertarungan politik menjadi sebuah cermin bahwa, eksklusi sosial dimainkan sebagai politics of collective boundaries “ yang melibatkan proses kontestasi dan negosiasi.<sup>39</sup> Politics of collective boundaries “ ditujukan sebagai upaya mempromosikan dan melanggengkan posisi kelompok untuk mengakses kekuasaan (negara dan civil society). Dipilihnya para Apel dengan segala keuntungan akumulasi fasilitas-fasilitas dan akses terhadap birokrasi desa, dengan secara sepihak tanpa transparansi dan demokrasi dalam setiap rezim berkuasa, menjadi sebuah contoh bahwa, kelompok-kelompok sosial di masyarakat digerakkan sebagai politic of boundaries, dimana promosi dan niat melanggengkan kekuasaan di dalamnya menggumpal dengan keras. Akhirnya, simpul-simpul relasi sosial menjadi kusut.

Seperti banyak telah disampaikan oleh beberapa sosiolog seperti Beall dan Piron dalam Fadhil Nurdin ketika mengulas tentang eksklusi sosial dan pembangunan mengatakan bahwa, Social Exclusion merupakan proses peminggiran sosial terhadap beberapa kelompok yang didiskriminasikan atas dasar etnis, ras, agama, orientasi

---

<sup>38</sup> Rusydi Syahra, *Eksklusi Sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan, Jurnal* (Masyarakat dan Budaya, edisi khusus 2010),h. 5-7.

<sup>39</sup> Rusydi Syahra, *Eksklusi Sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan, Jurnal* (Masyarakat dan Budaya, edisi khusus 2010),h. 121.

seksual, kasta, keturunan, gender, usia, kecacatan, HIV, migran atau berdasarkan lokasi dimana mereka tinggal.<sup>40</sup> Akan tetapi pada kenyataannya, ternyata politik juga memberikan andil besar untuk menciptakan eksklusi sosial, dimana pada akhirnya peminggiran dan diskriminasi yang digerakkan secara massif oleh pihak-pihak birokratis, akan melahirkan kelompok-kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam setiap rezim yang berlangsung.

Eksklusi sosial ini menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Silver yakni, lahirnya pengelompokan masyarakat menjadi dua kelompok yang tidak bersifat permanen. Pertama, kelompok yang menganggap diri sebagai orang-orang dalam (insider), yakni mereka dengan segala kekuasaan yang dimiliki bisa menguasai berbagai sumberdaya, dan bisa mengeksklusi individu dan kelompok lain (outsiders). Ke dua, kelompok orang-orang yang tereksklusi, yang merasa terdeprivasi karena merasa tidak ikut menikmati peluang dan keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan yang mereka anggap juga berhak mendapatkannya. Akan tetapi ketika terjadi perubahan sosial, politik dan ekonomi yang mampu menggoyang kemapanan, kelompok pertama yang bersifat eksklusif ini bisa ditembus. Sebagian orang yang sebelumnya tereksklusi bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok eksklusif yang sudah ada, atau membentuk kelompok eksklusif baru dengan

---

<sup>40</sup> M.Fadhil Nurdin, *Eksklusi Sosial Dan Pembangunan: Makna, Fokus dan pembangunan* (Manado: Universitas Padjadjaran 2015), h.34

mengeksklusikan orang-orang yang sebelumnya beda dalam kelompok yang sama, terutama apabila sumberdaya yang diperebutkan langka<sup>41</sup>.

Relasi kekuasaan di antara para aktor yang tidak setara merupakan dampak dari politisasi lingkungan (Politisasi lingkungan adalah adanya pusat kekuasaan atau dominasi aktor negara dan swasta terhadap sumber daya alam. Akibat dari dominasi tersebut, membatasi akses bagi sebagian para aktor lokal/penduduk asli, pengelolaan sumber daya dibidang agrarian dalam hal ini lahan yaitu relasi kuasa antar kelompok Petani lokal dan indikasih pemerintah setempat dalam memperoleh sumber daya Alam berupa lahan, yang memiliki nilai sosial, ekonomis, budaya dan politik. Selain itu, relasi kuasa terjadi antara kelompok petani lokal di Kecamatan Tombolo Pao dengan petani luar dari Kecamatan Tombolo Pao untuk mengelolah hasil pembebasan lahan didaerah tersebut, wilayah pertanian yang sama dan adanya perpindahan kuasa hak tanah dari masyarakat lokal ke masyarakat luar, bahkan pada tahap ini permasalahan agraria perebutan lahan terus meningkat menjadi tontonan pilu yang tidak kunjung berlalu, seperti kasus pembebasan lahan di Kecamatan Tombolo Pao, dengan adanya indikasi seperti (penjualan sertifikat tanah pembebasan, salin mengklaim atas tanah, pembagian tanah yang tidak merata serta pengklaiman penduduk setempat sebagai ahli waris tanah dari leluhurnya dulu). Penerima tidak tepat sasaran, adanya dugaan pungutan jual/beli sertifikat yang dilakukan oleh oknum. melalui pola politisasi relasi kekuasaan telah membatasi ruang gerak atau

---

<sup>41</sup> M.Fadhil Nurdin ,*Eksklusi Sosial Dan Pembangunan: Makna, Fokus dan pembangunan*, hlm. 16.

mengelola lahan. Akibatnya, respon politik yang dilakukan oleh kelompok petani lokal berupa perlawanan-perlawanan terhadap pihak Pemerintah dan masyarakat luar Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa yang ingin masuk di daerahnya untuk mengelola hasil lahan.

### **3. Analisis Dampak Kebijakan**

#### **a. Kebijakan**

Kebijakan adalah awal mula munculnya tentang teori analisis kebijakan. Kebijakan menurut Anderson (dalam Wahab, 2014:13) suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.<sup>42</sup> Hal lain diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn (dalam Parsons, 2014: 15) menyatakan 10 penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern yaitu, (a) label untuk sebuah bidang aktivitas, (b) ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, (c) proposal spesifik, (d) keputusan pemerintah, (e) otorisasi formal, (f) sebuah program, (g) output, (h) hasil (outcome), (i) teori atau model, (j) sebuah proses. Setelah menjelaskan tentang makna kebijakan, muncullah beberapa penjelasan dan indikator, yang pertama dijelaskan oleh Kent (dalam Wahab, 2014:41) bahwa analisis kebijakan adalah studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi yang berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan

---

<sup>42</sup> Isna Fitria & Ricka O, *Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi*, jurnal, (universitas muhammadiyah sudiarjo 2016)

masalah politik konkret. Sedangkan Dunn (1994:21) dijelaskan dengan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah yaitu, definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi. Dalam istilah khusus menyebutkan tentang perumusan masalah (definisi), peramalan (prediksi), rekomendasi (preskripsi), pemantauan (deskripsi), dan evaluasi. Parsons (2014: 84-85) membagi analisis dalam tiga model yaitu, (1) analisis meso adalah cara mendefinikan isu dan problem dalam menentukan agenda kebijakan, (2) analisis keputusan tentang bagaimana keputusan diambil dan bagaimana kebijakan dibuat, (3) delivery analysis tentang bagaimana kebijakan diatur, dikelola, diimplementasikan, dievaluasi, dan dihentikan.

#### b. Dampak

Dampak dalam Bahasa Inggris disebut impact yang bersinonim dengan effect (akibat) atau consequences (akibat). Dampak merupakan suatu akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi baik itu negative maupun positif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan tertentu. sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Jadi, ketika berbicara dampak pembangunan kita berbicara akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan. Dampak tersebut terdiri dari <sup>43</sup> :

---

<sup>43</sup> Afrizal, *Menganalisis Dampak Sosial Pembangunan*, Jurnal (Universitas Andalas, 2008)

1.) Dampak positif. Dampak yang dianggap baik oleh penyelenggara pembangunan maupun oleh orang lain.

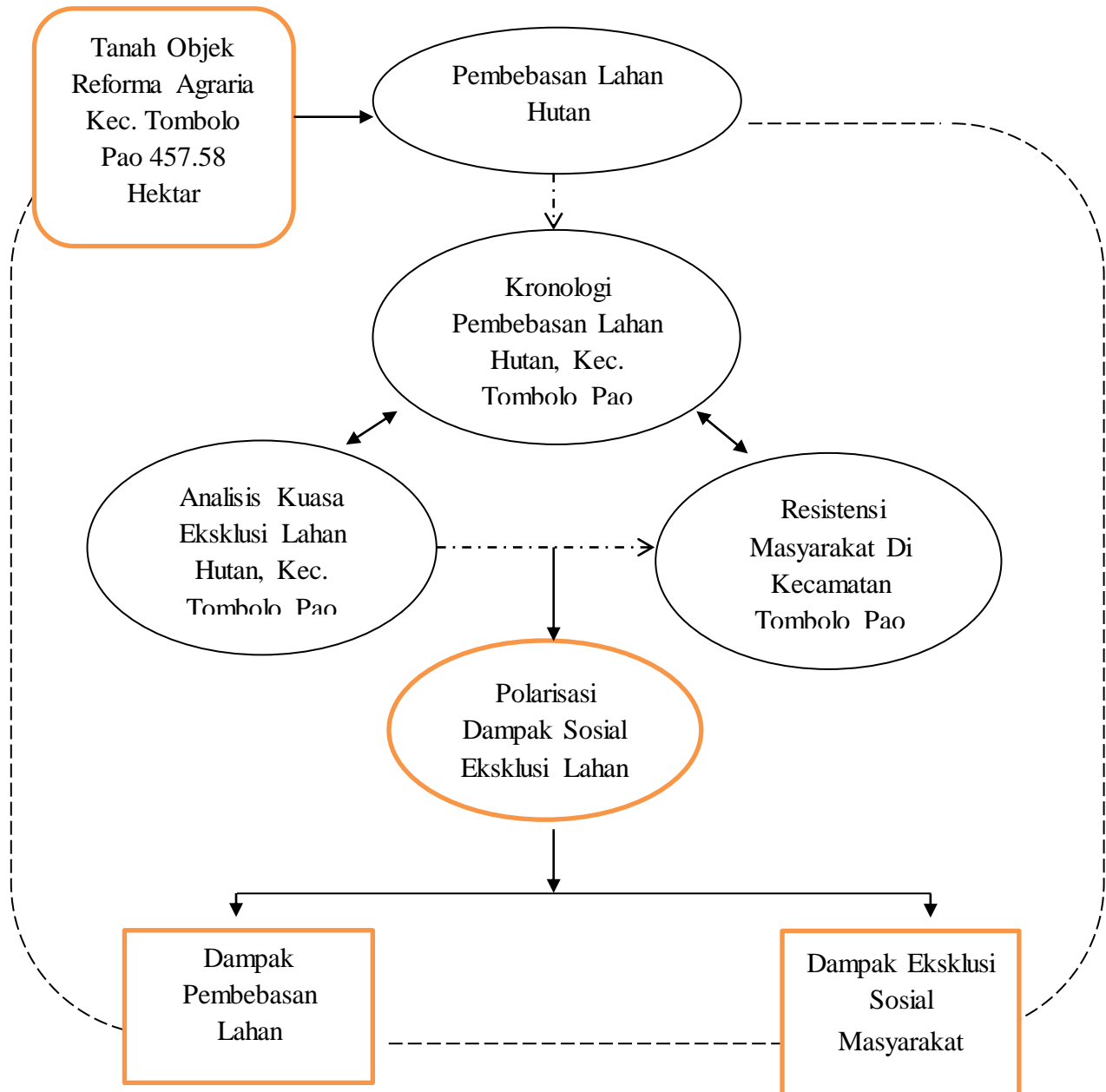
2.) Dampak negatif. Dampak yang dianggap tidak baik oleh penyelenggara pembangunan maupun oleh orang lain.

3.) Dampak yang disadari (intended consequences). Dampak yang direncanakan oleh penyelenggara pembangunan. Dampak ini adalah dampak yang diketahui dan disadari akan terjadi. Dampak seperti ini biasanya mudah diketahui karena disadari keberadaanya atau sering telah ditulis oleh penyelenggara pembangunan dalam proposal pembangunannya.

4.) Dampak yang tidak disadari (unintended consequences). Dampak yang tidak direncanakan oleh penyelenggara pembangunan. Dampak seperti ini biasanya sulit diketahui karena tidak disadari atau tidak pernah dapat ditemukan dalam proposal pembangunan oleh penyelenggara pembangunan. Dampak yang tidak disadari sering tergolong dampak negatif.

## B. Kerangka Pikir

Bagan 3.1 Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial, dinamis dan kritis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena pendekatan ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara mendetail. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik bentuk kata-kata maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena dan temuan-temuan yang di temukan ataupun yang terjadi di lapangan berdasarkan bukti atau fakta sosial yang ada misalnya perilaku, tindakan, dan persepsi. Seperti dalam pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah alat untuk memaparkan dan memahami makna yang berasal dari individu dan kelompok mengenai masalah sosial atau masalah individu.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Denzin dan Lincol penelitian kualitatif adalah penelitian yang

---

<sup>44</sup> John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. (PT Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2012.) h. 4.



menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>45</sup>

Peneliti melakukan Penelitian di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, untuk menganalisis bagaimana kuasa eksklusif atas tanah di Kabupaten Gowa (analisis kasus pembebasan lahan hutan di kecamatan Tombolo Pao).

## **B. Sumber Data**

Pada penelitian kualitatif biasa mengumpulkan data dari beragam sumber seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbang hanya mampu pada satu sumber data saja. Kemudian<sup>46</sup>, adapun sumber data yang digunakan yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber terkait dengan penelitian. Peneliti turun langsung ke masyarakat umum untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti dokumentasi hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan, serta memberikan sesi tanya jawab kepada narasumber dan menyimpulkan hasil wawancara, terhadap fenomena penelitian dalam kasus pembebasan, kuasa eksklusif atas tanah di Kabupaten Gowa (analisis kasus pembebasan lahan hutan di Kecamatan Tombolo Pao).

---

<sup>45</sup> Lely J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya 2017), h. 5.

<sup>46</sup> John W Creswell, *Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2012) h.261.

<sup>47</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder (secondary data), yaitu data penelitian yang diperoleh diperoleh atau dikumpulkan oleh instrumen penelitian dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, misalnya : profil wilayah desa, dokumen dari peristiwa yang terjadi, Undang-Undang yang terkait, buku serta sumber data yang dapat mendukung penelitian ini. dan juga dari referensi buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

#### 1. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik informan merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan<sup>48</sup>.

Wawancara ini peneliti melakukan *face-to-face interview* dengan partisipan. Wawancara seperti itu memerlukan pertanyaan yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan. <sup>49</sup>Wawancara dilakukan dengan bertemu langsung dengan informan di

---

<sup>48</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta : Grasindo, 2002), h. 119

kediaman atau di tempat yang dianggap dapat membuat informan fokus pada pertanyaan dan memberikan jawaban yang kredibel.

Pengambilan data dengan metode wawancara peneliti berada pada lokasi penelitian di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, seperti Pemerintah Kecamatan Tombolo Pao, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, penduduk asli Kecamatan Tombolo Pao data informan terlampir. Peneliti melakukan wawancara dengan mereka untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian kepada informan, dan informan memberikan jawaban secara bebas tanpa terikat dengan pola tertentu.

## 2. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi ini adalah ketika peneliti turun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh.<sup>50</sup> Observasi ini bersifat *open-ended* di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-

---

<sup>50</sup> John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, h. 254.

pandangan mereka.<sup>51</sup> Oleh karena itu metode observasi ini peneliti gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap saja, yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil wawancara.

### 3. Dokumentasi

Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data jelas besar sekali manfaatnya. Pada umumnya memberikan gambaran tentang foto sebagai data atau sebagai pendorong kearah menghasilkan data, perlu dikemukakan satu hal penting yaitu apabila sumber datanya berasal dari gambar akan baik sekali bila data itu dimasukkan kedalam *catatan lapangan*, barulah dianalisis.<sup>52</sup>

#### **D. Instrumen Penelitian**

Penelitian ini yang menjadi instrumennya adalah penulis sendiri, peneliti dilapangan bertindak sebagai observator, sebagai objek berbaur dengan masyarakat dan bertindak sebagai orang asing. Manusia sebagai *human instrumen*, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan di lapangan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), h.173.

<sup>52</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung 1989), h 157.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014). h. 222.

### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Berikut ialah ringkasan analisis kualitatif interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman :<sup>54</sup>

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.<sup>55</sup>

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa

---

<sup>55</sup> Siswanto, Suyanto, *Metode Penelitian Kombinasi, Kualitatif & Kuantitatif Pada Penelitian Tindakan (PTK & PTS)*, (Boss Script, Klaten Selatan, 2017), h 186.

sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.<sup>56</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan/ kesimpulan. Penyajian yang paling sering digunakan ialah bentuk teks naratif .

Penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, meliputi: berbagai jenis matrix, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padat dan mudah dipahami, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi.<sup>57</sup>

Data yang telah direduksi, selanjutnya dilakukan proses display data, metode penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dengan men-*display* data, maka akan memudahkan

---

<sup>56</sup> Siswanto, Suyanto, *Metode Penelitian Kombinasi, Kualitatif & Kuantitatif Pada Penelitian Tindakan (PTK & PTS)*, (Boss Script, Klaten Selatan, 2017), h 187.

<sup>57</sup> Siswanto, Suyanto, *Metode Penelitian Kombinasi, Kualitatif & Kuantitatif Pada Penelitian Tindakan (PTK & PTS)*, (Boss Script, Klaten Selatan, 2017), h 188.

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami<sup>58</sup>

### 3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Langkah selanjutnya yaitu analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman kesimpulan dan verifikasi adalah kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>59</sup>

### **F. Pengujian dan Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi data yaitu dengan mencocokkan data yang telah didapat di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumen atau bentuk data tertulis, kemudian dianalisis sehingga dapat ditemukan kebenaran data yang telah di kumpulkan di lapanga

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 249.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)h. 252.

## BAB IV

### ANALISIS

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan objek lokasi penelitian pada penelitian ini dibahas lebih awal untuk mengetahui objek terlebih dahulu sebelum mengkaji lebih jauh permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, meliputi: profil Kecamatan (Geografis), hingga pada fokus permasalahan tentang Kuasa Eksklusi Atas Tanah Di Kab. Gowa (Analisis Kasus Pembebasan Lahan DiKecamatan Tombolo Pao), Serta Dampak Dan Penanganan Pembebasan Lahan DiKecamatan Tombolo Pao. Pembahasan tersebut dianggap relevan dengan kajian yang dikaji dalam tulisan ini.

#### ***A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa***

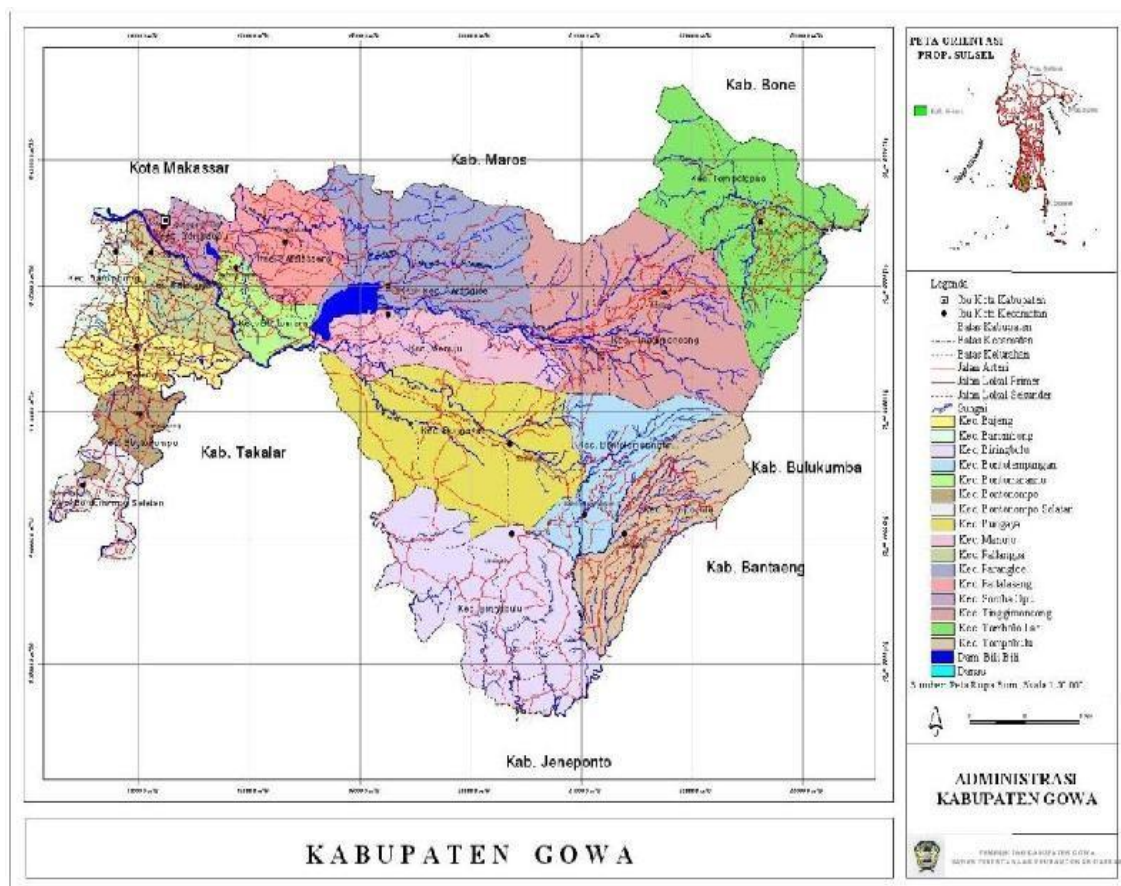
##### **1. Keadaan Geografis**

Kabupaten Gowa mempunyai posisi strategis karena berada di jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah timur indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan indonesia. Dengan kata lain kabupaten Gowa terletak pada 5°33'- 5°34' Lintang selatan dan 120°38'- 120°33'Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian 10-2800 meter diatas permukaan air laut. Namun demikian wilayah kabupaten gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan pegunungan Tinggimocong, Pegunungan Bawakaraeng-lompobatang dan batu reppe



cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai dengan luas aliran yang terbesar adalah sungai.

**Gambar 2.1 Peta Administrasi Kab. Gowa.<sup>60</sup>**



## 2. Wilayah Administratif

<sup>60</sup> Pemerintah Kabupaten Gowa “*Peta Administrasi Kabupaten Gowa*”, <https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/01/administrasi-gowa-a1-1.jpg> (26 februari 2021)

Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km<sup>2</sup> dengan panjang 90 km.<sup>61</sup>

**Tabel 1. 4 Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2016**

Kecamatan	Total Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas kabupaten (%)	Banyaknya Desa/Kelurahan		
			Desa	Kelurahan	Jumlah
Bontonompo	30,39	1,61	12	2	14
Bontonompo Selatan	29,24	1,55	8	1	9
Bajeng	60,09	3,19	10	4	14
Bajeng Barat	19,04	1,01	7	-	7
Pallangga	48,24	2,56	12	4	16
Barombong	20,67	1,10	5	2	7
SombaOpu	28,09	1,49	-	14	14
Bontomarannu	52,63	2,79	6	3	9
Pattallassang	84,96	4,51	8	-	8
Parangloe	221,26	11,75	5	2	7
Manuju	91,90	4,88	7	-	7
Tinggimoncong	142,87	7,59	2	5	7
Tombolo Pao	251,82	13,37	8	1	9
Parigi	132,76	7,05	5	-	5
Bungaya	175,53	9,32	6	1	7

<sup>61</sup> Rahman Jaya, “*Ekonomi Regional*”, <http://rahman-jaya.blogspot.co.id/2012/03/skripsi-ekonomi-regional.html> (27 November 2016).

Bontolempangan	142,46	7,56	6	2	8
Tompobulu	132,54	7,04	6	2	8
Biringbulu	218,84	11,62	9	2	11
<b>Jumlah</b>	<b>1.883,33</b>	<b>100</b>	<b>-</b>		<b>167</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Gowa 2016*

Secara Administratif pada tabel 4.1 Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan. Sungguminasa sebagai ibu kota Kabupaten terletak di kecamatan Somba Opu berjarak 10 km dari kota metro Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan kecamatan terjauh dari kota Kabupaten Gowa adalah Kecamatan Biringbulu yaitu dengan jarak tempuh sejauh 140 Km. Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pallangga dengan jumlah 12 desa dan 4 Kelurahan. Dan kecamatan tersedikit jumlah desanya adalah Kecamatan Parigi dengan hanya 5 desa.

#### 4. Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam mewujudkan sasaran strategis:

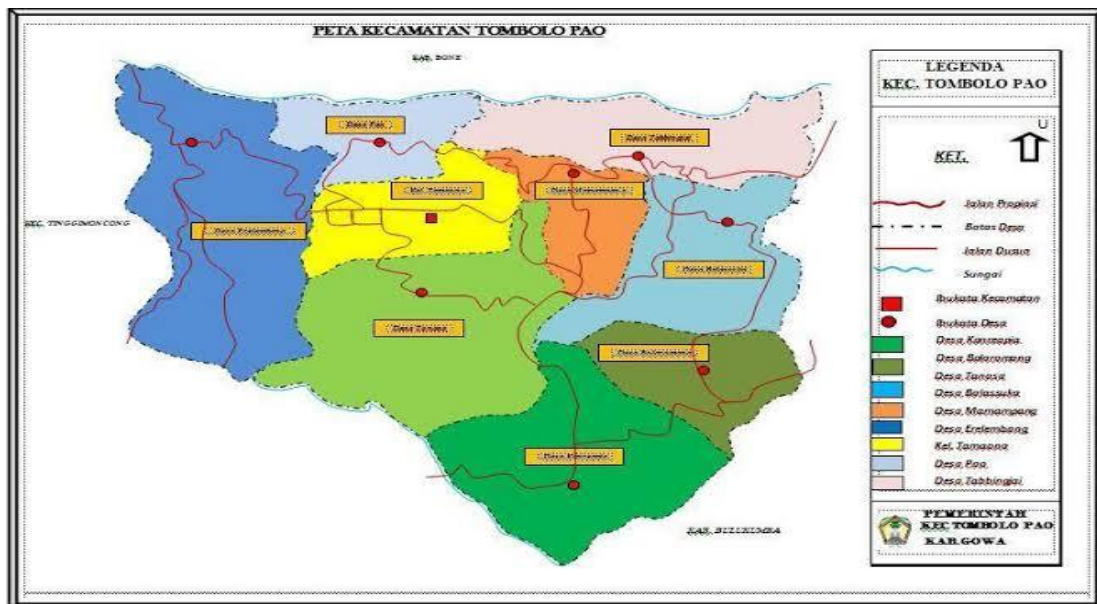
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah;
- Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah;
- Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah
- Program Penataan Agraria di Daerah;
- Program Pengadaan Tanah di Daerah

- f. Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah.

## B. *Profil Kecamatan Tombolo Pao*

Profil Kecamatan yang dipaparkan dalam tulisan ini adalah penjelasan tentang gambaran Kecamatan yang dianggap sangat dibutuhkan untuk dapat memahami dan menganalisis permasalahan dalam tulisan ini yang meliputi historis goeografis daerah ( lahan hutan), keadaan penduduk, tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Tombolo Pao.

**Gambar 2.2 Peta Kecamatan Tombolo Pao**



## 1. Geografis Kecamatan Tombolo Pao

Tombolo Pao adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Tombolo Pao dibentuk pada tahun 1998 dari hasil pemekaran kecamatan Tinggimoncong. Wilayah Kecamatan Tombolo Pao, berbatasan dengan kecamatan Sinjai Barat di kabupaten Sinjai (sebelah utara),

kecamatan Bontocani di kabupaten Bone dan kecamatan Tanralili di kabupaten Maros (sebelah Barat), kecamatan Tinggimoncong dan kecamatan Tinggimoncong di (sebelah Selatan). Tombolo Pao Mempunyai 9 desa 1 Kelurahan ,Desa Kanreapia, Desa Tonasa, Kelurahan Tamaona, Desa Tabbinjai, Desa Pao, Desa Mamanpang, Desa Erelembang, Desa Bolaromang, Desa Balassuka. Mayoritas penduduk kecamatan Tombolo Pao Berproposisi sebagai petani hal disebabkan letak geografis berada di bawah kaki gunung bawangkaraeng.

## **2. Keadaan Penduduk**

### **a. Kependudukan Kecamatan Tombolo Pao**

Jumlah penduduk sangat mempengaruhi keberlangsungan pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera serta kemajuan berdemokrasi. Masyarakat yang jumlahnya dapat dijangkau dengan baik selain berdampak baik dalam pelayanan tapi justru menjadi sebuah cela untuk dimanfaatkan segelintir orang misalkan saja dalam membatasi dari penerima manfaat atau kuasa eksklusif pertanahan. Meski demikian yang terpenting adalah masyarakatnya harus memiliki kualitas pendidikan untuk terwujudnya masyarakat sesuai cita-cita dibuatnya Undang-Undang Dasar.

Berikut data jumlah penduduk Kecamatan Tombolo Pao yang di rangkum dalam bentuk gambar persentase.

**Tabel 1.5 Data Penduduk Kecamatan Tombolo Pao**

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk					
		Pria	%	Wanita	%	Jumlah	%
1	Tamaona	1.759	0.48%	1.805	0.48%	3.564	0.48%
2	Ta'binjai	1.611	0.44%	1.583	0.42%	3.194	0.43%
3	Erelembang	2.195	0.59%	2.173	0.58%	4.368	0.59%
4	Kanreapia	2.463	0.67%	2.345	0.63%	4.808	0.65%
5	Pao	1.293	0.35%	1.235	0.33%	2.528	0.34%
6	Balassuka	1.606	0.43%	1.526	0.41%	3.132	0.42%
7	Mamampang	1.241	0.34%	1.181	0.32%	2.422	0.33%
8	Tonasa	2.645	0.72%	2.589	0.69%	5.234	0.70%

9	Bolaromang	523	0.14%	500	0.13%	1.02 3	0.14 %
Jumlah		15.336	4.13%	1.937	3.97%	30.2 73	4.05 %

*Sumber : Data Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Gowa<sup>62</sup>*

Persentase jumlah penduduk di atas menunjukkan jumlah keseluruhan masyarakat Kecamatan Tombolo Pao sebanyak 30.273 orang yang terbagi di 8 Desa dan 1 Kelurahan.

#### b. Mata Pencarian Masyarakat Tombolo Pao

Mata pencaharian atau sumber pendapatan dari masyarakat adalah salah satu penunjang kelangsungan hidup bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang dalam istilah ekonomi sering dibagi menjadi beberapa bagian ditinjau dari kegunaan barang diantaranya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan tersier.

Kecamatan Tombolo Pao pada dasarnya hampir sama dengan Kecamatan-Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Gowa yang dengan mata pencaharian masyarakat yang juga beragam. Secara keseluruhan mata pencaharian masyarakat Tombolo Pao dapat teridentifikasi dari tabel berikut ini.

---

<sup>62</sup> Data Kependudukan dan catatan sipil, Gowa, (05 Februari 2021)

**Tabel 1.6 Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Tombolo Pao**

PEKERJAA N	Erelemb ang	Bolaroma ng	Balang s u k a	Kanrea pia	Tonas a	Mamampa ng	Tabingja i	Pao	Tamao na
Petani	3688	343	1,080	2,473	2,334	1,465	1,411	637	2,111
Nelayan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pedagang	121	19	111	676	33	76	190	155	292
Peg. Negeri	63	20	25	243	64	33	66	89	362
TNI/ Polri	15	11	12	54	15	11	54	17	27
Peg. suwasta	89	28	38	724	72	45	84	56	225
Wiras wasta	75	16	20	75	75	20	56	45	260
Pensiunan	43	9	8	44	23	13	66	45	119
Pekerja lepas	199	62	142	435	55	98	332	322	97
Tdk bekerja	570	547	1737	934	1931	849	1036	867	998

Sumber: UPTB Kecamatan Tombolo Pao 2014



Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani sangat mendominasi dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 15545 jiwa, serta di urutan kedua dengan mata pencaharian terbanyak setelah petani yaitu profesi pedagang dengan jumlah, kurang lebih sebanyak 1675 jiwa. Namun jumlah masyarakat yang tidak bekerja juga menunjukkan angka yang cukup banyak yaitu kurang lebih 9469 jiwa dari keseluruhan Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tombolo Pao.

#### c. Luas Lahan Hutan dan Lahan Pembebasan TORA

##### 1. Luas Lahan Hutan

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan adalah suatu areal yang luas dikuasai oleh pohon, tetapi hutan bukan hanya sekedar pohon termasuk di dalamnya tumbuhan kecil seperti lumut, semak belukar dan bunga-bunga hutan. Hutan juga terdapat beranekaragam burung, serangga dan berbagai jenis binatang yang menjadikan hutan sebagai habitatnya<sup>63</sup>. Selain itu fungsi hutan merupakan penyeimbang bagi kehidupan manusia dan hewan sebagaimana sumber karbon dioksida, serta penyeimbang bagi alam ini, yang patut kita jaga sebagaimana untuk mempertahankan kualitas hidup manusia dari polusi udara yang semakin hari-semakin memprihatinkan serta khususnya habitat hewan dan tumbuhan yang berada dalam hutan.

---

<sup>63</sup> Supriadi, *hukum kehutanan dan hukum perkebunan di indones*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h 1.

**Tabel 1.7 Luas Hutan Di Kabupaten Gowa, PerKecamatan.**

Paduserasi Kabupaten Gowa 2004								
No	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas Kawasan hutan	Fungsi Kawasan hutan (Ha)				APL
				Lindung	Prod Tbs	Prod Biasa	Wisat Alam	
1	Tombolo Pao	25.182	12.179	6.220	8.540			12.963
2	Tinggimoncong	27.563	9.693	3.190	5.840		3.309	15.660
3	Tompobulu	13.299	3.050	463	2.587			9.736
4	Biringbulu	21.839	15.292	4.190	3.355	3.010		5.264
5	Bungaya	31.799	14.140	6.520	3.620	3.510		17.659
6	Parangloe	31.316	7.413	3.643	2.360	1.410		9.607
7	Bontommaranu	13.759	1.332			1.332		11.095
8	Bontonompo	5.963						
9	Bajeng	7.913						
10	Pallanga	4.829						
11	Sombaopu	2.809						
12	Barombong	2.062						
	Jumlah	188.333	63.099	24.226	26302	9.262	3.309	81.984

Sumber : Data dan Informasi Kehutanan Kabupaten Gowa, Tahun 2004

Dari tabel diatas terlihat bahwa luas dan fungsi lahan hutan tombolo pao berdasarkan peta paduserasi kabupaten Gowa 2004 yaitu sebanyak 25.182 HA. Dan luas kawasan hutan 12.179, dengan fungsi kawasan hutan (ha) dibagi menjadi empat status hutan yakni hutan lindung berjumlah 6.220, Prod Tbs berjumlah 8.540, Prod Biasa berjumlah tidak ada serta kawasan hutan wisata belum adap, jadi berangkat dari data diatas dapat ditarik kesimpulan yakni luas hutan Tombolo Pao dari total berjumlah 25.182 Ha.

## 2. Luas Lahan Tanah Objek Reforma Agraria “TORA”

Kabupaten Gowa salah satu daerah dari enam kabupaten di Sulawesi Selatan yang memperoleh kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 5.626,69 hektar yang tersebar di 8 kecamatan, 44 desa/kelurahan.

**Tabel 1.8 Luas Hutan Objek Agraria (TORA) Kabupaten Gowa<sup>64</sup>**

No	Kecamatan	Luas Lahan (TORA)
1	Biring Bulu	1.084,25 Hektar
2	Bontolempangan	112,62 Hektar
3	Bungaya	1.497,79 Hektar
4	Manuju	1.645,10 Hektar
5	Parangloe	519,83 Hektar
6	Parigi	76,32 Hektar
7	Tinggimoncong	233,19 Hektar
8	Tombolo Pao	457,58 Hektar
Jumlah		5.626,69 Hektar

Dari data diatas kita bias melihat data program tanah objek agrarian di kabupaten gowa tersebar di 8 kecamatan dan 44 desa/kelurahan Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Biringbulu seluas 1.084,25 hektar, Bontolempangan 112,62 hektar, Bungaya 1.497,79 hektar, Manuju 1.645,10 hektar, Parangloe 519,83 hektar, Parigi

---

<sup>64</sup> Hasma, “Ekonomi Regional” *Program Tora Kab.Gowa*”(06 februarib2020).

76,32 hektar, Tinggimoncong 233,19 hektar dan luas lahan tanah objek agrarian di kecamatan Tombolo Pao yakni 457,58 hektar.

d. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Data tentang tingkat pendidikan dalam penelitian ini dianggap penting karena untuk menganalisis atas tindak aksi kasus pembebasan oleh masyarakat serta tingkat kesadaran terhadap peran dalam mengawal pemerintahan kecamatan serta mengetahui kedewasaan berpikir dalam menangani persoalan ketegangan dalam masyarakat. Yang dirangkum dalam Tabel pendidikan.

**Tabel 1.9 Pendidikan Kecamatan Tombolo Pao**

Pendidikan	Erelemban g	Bolaroma ng	Balangsu ka	Kanreapi a	Tonasa	Mamampan g	Tabingj ai	Pao	Tamao na
Tdk sekolah	432	117	202	508	357	284	294	264	394
Tdk tamat SD	690	126	302	799	638	272	343	252	585
Masih SD	502	49	445	470	572	410	245	371	435
Tamat SD	1051	221	395	908	969	516	721	45	914
Masih SLTP	484	132	394	636	333	256	146	245	299

Tamat SLTP	644	124	306	545	645	312	331	161	512
Masih SLTA	295	63	547	541	211	222	255	270	421
Tamat SLTA	322	101	282	662	440	137	384	268	318
Masih P.T	142	62	161	293	180	102	254	152	
Tamat P.T	301	63	139	296	257	101	324	131	

Sumber: UPTB Kecamatan Tombolo Pao 2016<sup>65</sup>

Dari tabel diatas keadaan tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Tombolo Pao tergolong cukup baik. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Tombolo Pao berpendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat atau yang tamat sekolah dasar kurang lebih sebanyak 5740 penduduk dari keseluruhan Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tombolo Pao dan melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah lanjutan tingkat atas ataupun ke jenjang perguruan tinggi sebanyak 1662 penduduk.

---

<sup>65</sup> Kamaluddin, “ *Profil Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan*”, Format Laporan Profil Kecamatan (UPTB : Pemerintah Kecamatan Tombolo Pao, 2017).

### **C. Kronologi Kasus Pembebasan Lahan Hutan Di Kecamatan Tombolo Pao**

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, reformasi agraria menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Nawa Cita dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dalam RPJMN tersebut ditetapkan target pelaksanaan kebijakan reformasi agraria seluas 9 juta ha, yang terdiri atas kebijakan legalisasi aset (tanah) seluas 4,5 juta ha dan redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha. Di mana 4,1 juta ha tanah yang akan didistribusikan, berasal dari tanah kawasan hutan. Untuk memudahkan pencapaian target reformasi agraria tersebut di atas, khususnya Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) yang berasal dari tanah kawasan hutan, maka perlu disusun normanya dengan terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan lain yang menyertainya. Hal demikian penting agar redistribusi tanah untuk program reformasi agraria yang berasal dari kawasan hutan dapat memberi kepastian penguasaan hak atas tanah bagi masyarakat yang memperolehnya dan sekaligus meminimalisir terjadinya konflik dan/atau sengketa penguasaan tanah di kawasan hutan itu sendiri<sup>66</sup>.

Untuk mendukung dan memberi landasan hukum terhadap hal tersebut di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata

---

<sup>66</sup> Gunawan Wiradi, *Reformasi Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, (INSIST Press-KPA-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000), h. 3

Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan merupakan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, sedangkan perubahan fungsi kawasan hutan merupakan perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan, menjadi fungsi kawasan hutan yang lainnya<sup>67</sup>. Perubahan peruntukan kawasan hutan dilakukan melalui jalan tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan. Dalam hal ini dikarenakan kebutuhan lain dimaksud untuk kegiatan reformasi agraria, maka instrumen yang digunakan adalah pelepasan kawasan hutan.

Terkait dengan masalah penyediaan TORA dari kawasan hutan, maka penyediaan TORA dimaksud dapat diberikan dengan dasar peruntukan dan/atau penggunaan tersebut di atas, karena beberapa kegiatan di atas, pelakunya termasuk ke dalam subyek penerima TORA, seperti petani, nelayan, petambak, transmigran, buruh, kuli terminal/bangunan dan sebagainya yang pekerjaannya terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan di atas.

Permasalahan Reforma Agraria sering kali timbul permasalahan seperti halnya di kecamatan Tombolo Pao, permasalahan yang timbul beranjak dari adanya pembebasan lahan hutan seluas 457.58 Hektar yang tersebar tujuh desa satu kelurahan dikecamatan Tombolo Pao, dengan khusus di desa Tonasa dan kelurahan Tamaona kondisi konflik ditengah masyarakat mulai nampak pergejolakan

---

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah R.I., No. 104 Tahun 2015, *Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan*, Pasal 1 angka 13 dan angka 14.

diantaranya permasalahan penduduk lokal dimulai dari adanya kabar ditengah masyarakat bahwa akan ada pembebasan lahan hutan dikecamatan Tombolo Pao untuk dimanfaatkan, yang tersebar di beberapa desa untuk kepentingan masyarakat, dikelolah dan dijadikan lahan garapan pertanian, dan ditanami pohon yang bisa menghasilkan mudi-pundi ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Hal ini di sambut positif pada awalnya oleh masyarakat sekitar di Tombolo Pao karna akan menambah lahan garapan serta akan dijadikan lahan pertanian tambahan, tetapi fakta dilapangan tidak demikian malah berbanding terbalik dengan pandangan masyarakat awalnya, dengan asumsi reforma agrarian (TORA), diduga melalui Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) kabupaten Gowa akan di bagikan lahan garapan dari lahan hutan, tetapi dikemudian hari ada beberapa oknum dari pihak kehutanan yang ingin mengambil keuntungan dari lahan hutan tersebut, yang secara temuan dilapangan seorang yang mengaku dari pihak Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) kabupaten Gowa menyuruh masyarakat baik masyarakat setempat dan luar masyarakat Tombolo Pao, untuk masuk kehutan mematok lahan hutan serta merambah hutan dan sarat akan kepentingan komersial ekonomi untuk mendapatkan pundi-pundi ekonomi baik secara kelompok maupun perseorangan.

Terkait hal diatas oknum yang mengatasnamakan dari pihak kehutanan kabupaten Gowa menyuruh masyarakat dalam hal merambah dan mematok kawasan hutan dengan alih-alih penggiringan kawasan hutan reforma agrarian, oknum tersebut memberikan penawaran seperti memfasilitasi masyarakat seperti memberi informasi



terkait lahan hutan yang masuk dalam kawasan pembebasan lahan hutan dan memberi bantuan pengajuan sertifikat tanah ke kabupaten Gowa untuk pengalihan lahan hutan menjadi hak milik, yang mana prosesnya memerlukan aturan administrasi dari pihak terkait, tetapi hal dilapangan malah memicu permasalahan ditengah masyarakat, yang informasih dilapangan lahan hutan pembebasan diduga diperjual belikan dan diberikan peluang masyarakat luar Tombolo Pao masuk untuk mematok lahan pembebasan hutan di daerah kawasan hutan pembebasan, yang mana jika kita merujuk Pasal 33 peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 subjek reforma agraria yang salah satunya yang bisa mendapat manfaat dari lahan pembebasan seperti a. bangunan rumah masyarakat yang berada dikawasan hutan dan status lahan tersebut masih kawasan hutan bisa di bebaskan setidaknya-tidaknya di diami sekitar 15 tahun, b. petani yang memiliki luas lahan 0,25 ha, atau lebih kecil dan atau petani yang menyewa tanah yang luasnya tidak lebih 2 ha, 3. buruh tanah yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah, pekerja harian lepas serta wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah redistribusi tanah pembebasan.<sup>68</sup> Hal demikianlah yang menurut aturan yang berlaku yang sesuai berhak menerima manfaat dari lahan pembebasan hutan.

Aturan Prosedural pembebasan lahan hutan sesuai amanahkan UU jika kita melihat kasus pembebasan lahan hutan dikecamatan Tombolo Pao tidak sesuai dengan pengabluka dilapangan, hal ini mengundang polemik dari masyarakat

---

<sup>68</sup> Arya pratama, *Setkab Perpres No 86 2018*, (Tanah Objek Reforma agrarian,2018)

setempat jika dibiarkan masuk ke hutan untuk merambah kawasan hutan akan berdampak bagi masyarakat sekitar seperti rusaknya ekosistem hutan serta sumber air di kawasan masyarakat yang berada di daerah bawah Tombolo Pao akan mengalami kekurangan air untuk lahan pertanian jika perambahan hutan terus dilakukan..

Dilain sisi bukan hanya pada permasalahan tentang penerima manfaat dari kawasan hutan yang di diduga dari tataran oknum dari pihak Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) tetapi menjadi lahan bagi oknum lain seperti lembaga swadaya masyarakat, yang informasih dilapangan ikut andil dan terlibat dalam proses perambahan dan mengiming-imingi masyarakat untuk dibantu mulai dari administrasi pembebasan hutan yang mana syaraat akan adanya tindak ingin mendapatkan keuntungan dari lahan pembebasan hutan seperti menawarkan masyarakat sertifikat lahan hutan yang mengatasnamakan dari sertifikat kabupaten. Hal ini yang mengundang polemik ditengah masyarakat setempat seperti adanya penolakan karna sewajarnya masyarakat setempatlah yang mendapatkan manfaat itupun tidak semua hanya yang masuk dalam kriteria dari aturan reforma agraria pembebasan lahan hutan, belum lagi masyarakat setempat melarang orang luar dari Kecamatan Tombolo Pao masuk untuk merambah hutan karna menurutnya hutan tersebut adalah warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun. permasalahan ini menimbulkan adanya salin mengklaim atas tanah, sehingga menimbulkan kasus horizontal ditengah masyarakat luar kecamatan Tombolo Pao dengan masyarakat setempat setempat.

Polemik permasalahan kasus pembebasan lahan hutan dan di kecamatan Tombolo Pao diatas mengakibatkan keresahan bagi masyarakat diakibatkan adanya kebijakan yang tidak mengikuti procedural yang berlaku serta adanya perambahan hutan yang dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab, dimana hal diatas sarat akan kepentingan kuasa serta pembatasan hak penerima manfaat atas tanah di kecamatan Tombolo Pao, Sehingga kasus tersebut sarat akan tindak kuasa eksklusif kuasa yang terstruktur.

#### **D. Analisis Kuasa Eksklusif Lahan Hutan di Kecamatan Tombolo Pao**

Eksklusif dari lahan merupakan masalah kritis di banyak negara berkembang, dan berkaitan erat dengan kemiskinan dan ketidakamanan. Lahan atau tanah bukan saja sebagai sumber penghidupan tetapi dalam arti luas juga merupakan sumber integrasi, Hubungan antara eksklusif dan akses pada tanah bahkan ditemukan juga pada lingkungan dengan tanah yang luas. Salah satu penyebab adalah menurunnya lahan produktif yang tersedia bagi sejumlah besar penduduk perdesaan, baik karena menurunnya kesuburan atau karena kepemilikan lahan berpindah ke tangan sejumlah kecil individu atau perusahaan. Intervensi

pemerintah seringkali bukannya mengurangi eksklusif malahan semakin menambahnya karena dalam pelaksanaan intervensi yang dilakukan bahkan semakin

mecemaskan penduduk setempat demi kepentingan para pengusaha hutan atau pengembangan lokasi wisata.<sup>69</sup>

Sebagai daerah dengan mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian, masyarakat di Kecamatan Tombolo Pao, pada umumnya memiliki karakter yang tidak berbeda dari masyarakat tani di daerah lainnya. Adanya perkumpulan petani serta kehidupan masyarakat yang cenderung masih bersifat tradisional menguatkan identitas masyarakat di Kecamatan Tombolo Pao yang mayoritas bergelut di sektor pertanian. masyarakat memiliki karakteristik tersendiri diantaranya, memiliki keterikatan yang erat pada tanah, keterikatan terhadap desa dan komunitas lokal, pentingnya keluarga secara sentral, perkawinan menjadi salah satu persiapan kecukupan ekonomi menuju makmur; serta adanya ketegangan antara keterikatan masyarakat terhadap tanah dan komunitas lokal dengan keharusan menghasilkan uang.

Perkembangan serta kebijakan pemerintah kabupaten Gowa secara langsung berpengaruh terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Tombolo Pao. Seperti halnya kebijakan pembebasan lahan hutan dikecamatan Tombolo Pao dalam analisis pembebasan lahan hutan dalam bentuk Reforma agraria pembebasan lahan hutan, sebuah siklus kekuasaan terhadap pembagian lahan hutan. Dalam penerapan kebijakan tanah objek agraria di kecamatan Tombolo Pao menuai Permasalahan,

---

<sup>69</sup> Hall, Derek, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li, *Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia*, (Singapore: National University of Singapore 2011) h. 59

permasalahan ini berupa, pembatasan hak pembagian, kurang pemerataan penerima manfaat, tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentang syarat penerima manfaat lahan hutan reforma agrarian, yang dapat dilihat dari pola-pola yang ada, seperti pada pembagian lahan di kelurahan tamaona yang mana dalam wawancara saya dilapangan dengan tokoh masyarakat.

Misbahuddin mengatakan ketika pembagian lahan hutan terkhususnya di kelurahan tamaona, tepatnya dilingkungan Bonto Balang ada dua daerah yang mana letaknya berada pada kawasan hutan seperti “pa’barung, Monrojai dan Parang Lompoa” mengalami pembebasan lahan hutan untuk akses lahan garap, adapun pola pembagiannya yakni masyarakat terkhususnya di Kelurahan Tamaona diberitahukan untuk kedaerah kawasan hutan untuk mematok lahan kawasan hutan agar dijadikan lahan garapan bagi masyarakat<sup>70</sup>

Sebagai masyarakat sekitar merespon dengan baik dengan adanya arahan untuk masuk ke kawasan hutan mematok lahan untuk digarap yang nantinya bisa berstatus pengalihan tanah Negara menjadi tanah perseorangan.

Dalam penguasaan tanah di kelurahan Tamona sarat akan tidak tertibnya dan tidak mengikuti aturan tentang pembebasan lahan hutan di kelurahan Tamona, dilihat dari waktu yang diberikan hanya satu hari untuk masuk ke kawasan hutan mematok lahan, dilain sisi ketidaktahuan masyarakat sekitar juga berdampak langsung pada saat hari pembebasan lahan hutan di kelurahan Tamaona, dimana masyarakat yang tidak tahu pada hari itu tidak dapat apa-apa dari lahan hutan pembebasan, arahan ini menimbulkan polimik di tengah masyarakat sekitar serta tidak adil dalam pemerataan

---

<sup>70</sup> misbahuddin (66 Tahun), *Tokoh Masyarakat, di rumah narasumber tombolo Pao*, (11Desember 2020)

hak atas manfaat tanah lahan hutan pembebasan, hal ini tidak sesuai aturan yang berlaku dan sangat jauh dari aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat dalam pembagian.

Jika kita merujuk pada prosedur pemanfaatan dan pembebasan lahan TORA sesuai acuan diatas, ketidak sesuai prosedur yang berlaku yang diterapkan oleh aparat dalam pembagian lahan pembebasan, hal diperkuat dengan adanya temuan dilapangan bahwa peruntungan hak atas manfaat lahan pembebasan TORA diantaranya warga miskin yang bermukim ditempat itu dan masuk dikawasan hutan,tempat tinggal yang berada pada kawasan hutan yang sudah ditempati kurang lebih 10 tahun, serta masyarakat miskin yang tidak punya lahan garapan ini semua adalah salah satu yang harus mendapatkan dari manfaat lahan hutan pembebasan, tetapi hal diatas diselewengkan oleh aparat dalam pembagian,dimana yang mendapat manfaat lahan pembebasan mengatakan bahwa meskipun masyarakat disuruh mematok lahan hutan pembebasan, pemerintah juga mengambil peran dalam hal pembagian seperti pembagian tidak merata dan bahkan pihak pemerintah juga mendapatkan manfaat dari lahan pembebasan tersebut.

Polemik kasus pembebasan lahan hutan dikecamatan Tombolo Pao, dalam pemanfaatan lahan hutan pembebasan, menimbulkan aturan tersendiri dimana lahan yang berada pada kawasan hutan pinus yang masuk pembebasan tidak boleh dirusak, dengan kata lain bisa di tanami beberapa tanaman didaerah kawasan hutan pinus, dan di haruskan jangan menebang hutan pinus, pengalihan menjadi hak tanah masyarakat

di kawasan tersebut bisa diambil alih ketika sudah pohon pinus sudah mati, untuk menjaga stabilitas ekosistem hutan, hal ini menimbulkan permasalahan dimana masyarakat menganggap bahwa hak atas pembebasan terbatas untuk dikelola dan dijadikan lahan garapan untuk sayur-sayuran, karna mengakibatkan tidak akan tumbuh secara maksimal ketika masih ada pohon pinus yang ada di daerah tersebut sebab terhalangi sinar matahari untuk tumbuh berkembang, hal ini berdampak warga yang mendapatkan hak manfaat lahan hutan pembebasan yang berada di kawasan hutan pinus hanya bisa menanam lahan tersebut seperti cengkeh, kopi dan kayu.

Dilain sisi pola Eksklusi pembebasan lahan hutan di Kecamatan Tombolo Pao sangat tidak tepat sasaran dalam pola pembagian lahan TORA, menghasilkan ketimpangan bagi masyarakat diakibatkan proses pembagian yang menerima manfaat dari lahan pembebasan masyarakat tidak adil yang mana ada yang mendapatkan tempat yang strategis seperti berada di hilir sungai, ada yang dapat ditengah-tengah hutan, pinggiri hutan, serta ada yang mendapatkan lahan pembebasan di kemiringan 70 derajat, pembagian luasnyapun tidak merata sebab meskipun dalam jumlah satu keluarga semisal 5 orang dan pada hari itu datang kelahan hutan pembebasan semuanya dapat. Hal lain yang menarik adalah sebagian aparat pemerinta kecamatan juga termasuk dalam penerima manfaat lahan pembebasan dan luas lahan yang didapat sangat luas dibandingkan dengan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari lahan pembebasan, berangkat dari acuan diatas nampak sebuah adanya

pembatasan hak pembagian dilihat dari melihat pola-pola pembagian lahan hutan yang ada.

Merujuk pada teori Hall, Hirsch, dan Li, dalam membagi proses eksklusif menjadi tiga. Pertama, bagaimana pihak tertentu memelihara akses atas tanah yang mereka punya dan mencegah akses calon pengguna lain; kedua, bagaimana pihak tertentu yang memiliki akses atas tanah kehilangan akses tersebut; ketiga, bagaimana pihak tertentu yang memiliki akses, dicegah untuk mendapatkan akses. Bagi mereka, eksklusif mesti dipahami lebih luas dari konsep kepemilikan pribadi, Eksklusif tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya hak resmi, tetapi oleh berbagai kekuasaan yang dapat mencegah orang mendapatkan akses dari tanah.<sup>71</sup>

Ketika kita melihat rujukan teori diatas proses penguasaan lahan hutan pembebasan di kecamatan Tombolo Pao, berpeluang pembatasan hak akses atas penerima manfaat lahan hutan, peraturan yang memiliki komponen seperti menentukan batas petak tanah, jenis penggunaan tanah yang diperbolehkan atau dilarang, menentukan jenis-jenis klaim kepemilikan atau hak pemanfaatan yang dapat diberikan untuk berbagai macam status tanah, serta menentukan individu, kelompok, atau instansi mana yang mempunyai hak atas lahan tertentu<sup>72</sup>. Proses pembebasan lahan hutan di kecamatan Tombolo Pao berpeluang pembatasan hak akses atas lahan pembebasan dimana masyarakat hanya diberi waktu satu hari untuk mematok lahan

---

<sup>71</sup> Derek Hall, Philip Hirsch & Tania Murray Li, *Kuasa eksklusif, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2020), h. 12 .

<sup>72</sup> Derek Hall, Philip Hirsch & Tania Murray Li, *Kuasa eksklusif, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2020), h. 29.



hutan yang menjadi lahan pembebasan, hal ini menuai persoalan dimana harusnya pemerintah, memberikan sosialisasi dan pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat bagaimana prosedural hak yang berhak menerima manfaat, belum sampai disitu permasalahan lainnya adalah proses pembagian yang tidak adil penempatan penerima manfaat lahan hutan memberikan peluang pembatasan hak penerima manfaat dimana ada beberapa yang mematok lahan hutan pembebasan di kemiringan 70 derajat, ada yang sangat jauh di dalam hutan, belum lagi yang mematok lahan pembebasan yang sangat strategis di tempat yang tidak jauh dari sungai dan mempunyai tanah yang datar, dan permasalahan lain masih banyak masyarakat di kecamatan Tombolo Pao yang secara materi dan kepunyaan lahan sangat minim tidak dapat lahan pembebasan akibat waktu yang ditentukan cuman satu hari, mengakibatkan masyarakat yang tidak tahu hari itu tidak mendapatkan lahan pembebasan, sehingga sarat akan pembatasan akses atas lahan bagi yang seharusnya menerima manfaat, hal ini menjadi kurang adil sebab tidak merata dalam mengakses tanah lahan pembebasan.

Disisi lain proses pembebasan lahan hutan tidak tepat sasaran dan diduga salah satu aparat pemerintah juga mendapatkan manfaat lahan pembebasan yang sangat luas di kecamatan Tombolo Pao, kuasa legitimasi yang dapat dipahami sebagai alasan pembenaran atas kondisi sesungguhnya atau ideal yang merujuk pada nilai-nilai moral. Kuasa ini berperan penting dalam mendukung berbagai bentuk eksklusi.

Argumen “apa yang layak dan benar” menjadi landasan normatif suatu eksklusi<sup>73</sup>, dimana hal diatas adalah kuasa legitimasi kekuasaan menjadi landasan normatif, kalau kita merujuk pada aturan prosedural yang berlaku tentang hak penerima manfaat, aparat pemerintah tidak termasuk menjadi kriteria penerima manfaat, hal ini berkaitan dengan yang seharusnya tidak memiliki akses manfaat lahan hutan pembebasan mendapatkan lahan akses pembebasan.

Proses penerimaan manfaat lahan hutan di kecamatan Tombolo Pao, terus menjadi sorotan, baik dirana pemuda dan masyarakat hal ini diakibatkan berbagai kondisi sehingga menimbulkan ketimpangan ditengah masyarakat di kecamatan Tombolo Pao, belum lagi kasus perambahan hutan di kecamatan Tombolo Pao yang kian meresahkan akibat adanya perambahan hutan yang dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab hal ini bisa kita lihat khususnya di desa Tonasa sudah ada beberapa temuan di lapangan yang di rambah dan belum termasuk dalam kawasan pembebasan lahan hutan, dengan alih-alih dijadikan isu tanah yang menjadi lahan hutan pembebasan reforma agrarian.

Sebagai sebuah pemanfaatan lahan hutan menjadi lahan pembebasan sudah menjadi baik untuk di jembut untuk kemaslahan dan kemakmuran bagi penerima manfaat seperti orang miskin, tetapi disisi lain permasalahan selalu muncul dalam pengablिकासian dilapangan seperti halnya di kecamatan Tombolo Pao.

---

<sup>73</sup> Derek Hall, Philip Hirsch & Tania Murray Li, *Kuasa ekslusi, Dilema Pertanian di Asia Tenggara*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2020), h. 29.

Peran pemerintah kecamatan Tombolo Pao dalam melihat polemik yang terjadi terkait masalah pembebasan lahan hutan kurang berpengaruh langsung terkait proses pembebasan lahan hutan, yang secara kebijakan kurang mengantisipasi dari awal akibat yang ditimbulkan dalam proses perambahan hutan dan pembebasan lahan hutang di kecamatan Tombolo Pao, pemerintah kecamatan secara tidak langsung menitip beratkan kasus pembebasan lahan hutan ke pada pemerintah terkait dalam hal ini pemerintah kabupaten Gowa, untuk memberikan solusi yang terjadi atas problem pembebasan lahan hutan di kecamatan Tombolo Pao, yang menuai permasalahan ditengah masyarakat akibat proses pembebasan lahan hutan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Hal ini di ungkap oleh Astan Pagessa PLT Camat Tombolo Pao, Pembebasan lahan di kecamatan Tombolo Pao, pemerintah kecamatan sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten dan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah kabupaten Gowa, selanjutnya aktivitas pembebasan lahan hutan di kecamatan Tombolo pao untuk sementara tidak jalan Sampai ada arahan lebih lanjut dari kabupaten Gowa.<sup>74</sup>

Serta pada permasalahan Eksklusi perambahan hutan, akar permasalahannya ada pada prosedural pembebasan lahan hutan di kecamatan Tombolo Pao yang melibatkan banyak unsur seperti sesatuan pengelola hutan (KPH) di kabupaten Gowa, yang berdasarkan analisis lapangan, permasalahan ini muncul karna kurangnya sosialisasi dan pendekatan ditengah masyarakat, yang ingin mendapatkan hasil manfaat dari lahan hutan, serta pada perambahan hutan sehingga memicu

---

<sup>74</sup> Astan Pagessa (37 Tahun), *PLT Camat Tombolo Pao*, di kantor Camat Tombolo Pao, (01 Januari 2021).

adanya aksi media dan protes dari masyarakat setempat, belum lagi memicu adanya kasus konflik horizontal ditengah masyarakat seperti di Desa Tonasa yang mengusir warga yang bukan dari warga setempat yang ingin masuk merambah hutan,

Dinamika kasus pembebasan lahan hutan dan perambahan kawasan hutan di kecamatan Tombolo Pao semakin berefek langsung bagi masyarakat setempat dan hal ini mengundang keresahan sehingga mengakibatkan resistensi ditengah masyarakat seperti aksi penolakan pembebasan hutan yang tidak sesuai prosedural serta masyarakat mengadu ke pemerintah melalui jalur rapat dengar pendapat (RDP) yang di fasilitasi oleh DPRD Kabupaten Gowa.

#### **E. Resistensi Masyarakat Di Kecamatan Tombolo Pao**

Sistem demokrasi dan kebijakan yang dibangun saat ini diharapkan sampai pada sistem demokrasi dan kebijakan substantif bukan klaim demokrasi dan peneramapan kebijakan yang tidak adil, yang sebatas demokrasi beberapa orang dan menentukan sebuah kebijakan yang tidak mensejahterkan rakyat, dilain hal keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan kontrol terhadap pemerintahan sebagai bentuk demokrasi bahwa rakyat yang memegang kendali atas pemerintahan, dengan alasan kesejahteraan demokrasi diadopsi menjadi sistem yang digunakan untuk menjadi wadah struktural untuk mewujudkan tatanan masyarakat adil dan ideal.

Sebuah kebijakan sudah sewajarnya harus di laksanakan sebagai mana mestinya untuk kepentingan mensejahterakan rakyat, kebijakan ini diambil untuk mendorong masyarakat bias memanfaatkan kebijakan tersebut, dilain sisi persoalan kebijakan pembebasan lahan hutan dan perambahan hutan di kecamatan Tombolo Pao menuai reaksi penolakan bagi masyarakat setempat, dan menimbulkan resistensi perlawanan ditengah masyarakat hal ini diakibatkan karna kebijakan yang tidak mengacu pada procedural dan mengakibatkan dampak bagi masyarakat.

### **1. Resistensi Penolakan Melalui Media**

Kesadaran dalam memahami demokrasi dirana kebijakan di suatu masyarakat kecamatan Tombolo Pao berdasarkan indeks pendidikan yang cukup tinggi tentu beriringan dengan sumber daya manusia yang memadai serta pemahaman yang baik mengenai sistem demokrasi dalam kontrol kebijakan, para pendidik yang paham persoalan sebuah kebijakan juga banyak lahir dikecamatan ini yang memungkinkan untuk mengontrol sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah baik dirana kecamatan, daerah maupun tingkat pemerintah pusat.

Sebuah resistensi atau perlawan dimasyarakat akan muncul ketika sesuatu hal yang keluar dari koridor hukum ataupun kebijakan yang berlaku, serta efek yang terjadi dari kebijakan tersebut, seperti halnya pada kasus pembebasan lahan hutan dan perambahan kawasan hutan di Kecamatan Tombolo Pao, dalam kawasan reforma agrarian, yang menuai reaksi di tengah masyarakat akibat dari kebijakan yang kurang baik pelaksanaanya.

Permasalahan ini mengundang efek permasalahan ditengah masyarakat seperti pembagian tanah yang tidak merata dimana warga secara massif berbondong-bondong masuk ke lahan hutan untuk mencari lahan untuk digarap, dengan hal ini pembagian lahan hutan secara tidak langsung tidak merata sebab tidak ada aturan baik di pemerintah kecamatan, oleh sebab itu ada beberapa warga setempat khususnya di Desa Tonasa dan Kelurahan Tamaona menolak kalau masyarakat, berbondong-bondog masuk di daerahnya untuk mengambil alih lahan hutan karna lahan hutan tersebut adalah milik nenek moyang mereka selama ini dan jika warga masuk menggarap maka akan merusak hutan karna akan mengakibatkan dampak dan kerusakan hutan yang akan datang. hal ini Penyebab kegaduhan agraria pembebasan lahan hutan seperti halnya pengakuan dan perlindungan minim atas hak entitas masyarakat, perampasan dan penyerobotan lahan sewenang-wenang, dan sengketa tapal batas. Juga, ketidakpastian dan diskriminasi hukum, di mana banyak masyarakat kecil tak terlalu mengetahui hukum hingga mudah kalah. Tak hanya itu, penyerapan aspirasi, partisipasi, sosialisasi kepada masyarakat dalam sebuah proyek atau investasi juga minim membuat masyarakat merasa resah dan memicu adanya suara tidak sepakat atas pembebasan di lahan hutan di Kecamatan Tombolo Pao.

Dalam kasus pembebasan lahan hutan di Kecamatan Tombolo Pao seperti diatas mengancam pembongkaran dan dugaan nantinya akan mengusir secara paksa masyarakat local yang mendiami lahan hutan tersebut, dengan hal itu masyarakat dengan pemuda setempat melakukan aksi menolak pembebasan lahan hutan di

kecamatan Tombolo Pao dengan melakukan aksi penolakan melalui media dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait untuk menghentikan proses perambahan yang dilakukan oleh orang luar Tombolo Pao.

Perlawanan masyarakat dalam melihat pembebasan lahan hutan di kecamatan Tombolo Pao dengan jalur media berefek dan ditanggapi langsung ditataran pemerintah daerah khususnya pihak kepolisian kapolres gowa, sebagai tindakan responsif aparat kepolisian meninjau langsung pembebasan dan perambahan hutan yang diduga salah dalam prosedural pembebasan serta maraknya kasus perambahan hutan yang belum termasuk dalam kawasan lahan pembebasan, hal pengaduan masyarakat ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Perang media di era digital sekarang cukup berperang aktif dalam merespon sebuah permasalahan karna efeknya berpengaruh langsung untuk mewakili aspirasi masyarakat agar aspirasi tersebut bisa didengar atas apa yang ingin disoroti, belum lagi pengarnya bisa menghasilkan solusi akibat permasalahan yang diangkat, agar kedepan pihak- pihak yang tak bertanggung jawab tidak mengulangi perbuatan yang bisa merugikan masyarakat.

Sarana melalui media juga membantu masyarakat yang belum tahu bagaimana kejadian sebenarnya dan dampak yang ditimbulkan ketika kasus perambahan dan pembebasan lahan hutan tidak berjalan sebagai mana mestinya, hal ini bisa kita lihat kondisi masyarakat ketika aksi media dilakukan sekelompok masyarakat di

kecamatan Tombolo Pao, dan berefek langsung sebagai media sarana untuk memahami masyarakat kejadian yang sebenarnya dan dampak yang ditimbulkan ketika perambahan hutan dan pembebasan lahan hutan yang tidak sesuai procedural secara langsung masyarakat diberikan wawasan dan gambaran atas kejadian tersebut melalui media yang dirilis terkait permasalahan tersebut.

Tidak sampai disitu peran media pun berpengaruh bagi para aktor perambah hutan dan tentunya akan berpikir matang-matang ketika ingin mengulangi perbuatan tersebut, yang gilirannya akan di proses sebagaimana aturan tentang pengrusakan dikawasan hutan, sebagai mana kasus yang ada di kecamatan Tombolo Pao.

## **2. Resistensi Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Di DPRD Kabupaten Gowa.**

Ketegangan masyarakat kecamatan Tombolo Pao, bermula setelah terjadinya Penolakan berupa aksi melalui media, disebabkan efek dari kasus perambahan hutan dan pembebasan lahan hutan yang tidak sesuai dengan procedural yang berlaku yang menurut aturan reforma agrarian (TORA), dengan tuntutan penolakan terhadap perambahan hutan serta tuntutan memperbaiki system kebijakan pembebasan lahan hutan dikecamatan Tombolo Pao, serta pemerintah kabupaten harus turun tangan segera dan memberikan solusi terhadap polemik yang terjadi dikawasan hutan Tombolo Pao, Ungkap narasumber mengenai keadaan masyarakat pasca aksi media.



Masyarakat melalui pemerintah kecamatan dan pemuda menindak lanjuti dan melaporkan dugaan adanya perambahan hutan di kabupaten Gowa melalui temuan dilapangan berupa lahan yang telah rusak akibat proses perambahan hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, hal ini menuai respon oleh pihak kepolisian kabupaten Gowa dan memerintahkan anggota dari Polres Gowa untuk turun menyelidiki kasus perambahan hutan di Kecamatan Tombolo Pao dan menemukan adanya tindak pengrusakan kawasan hutan di daerah kawasan hutan Tombolo Pao, berangkat dari temuan kepolisian terkait proses perambahan hutan tersebut menghasilkan, ditangkapnya salah satu oknum dari pihak kesatuan pengolahan hutan “KPH”, oknum salah satu masyarakat di Kecamatan Tinggi Moncong, dan oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang dugaan dengan merambah hutan dan menyuruh masyarakat sekitar ikut andil dalam merambah hutan untuk dijadikan lahan garapan pertanian.

Belum sampai disitu para pelaku perambahan hutan di Kecamatan Tombolo Pao juga diduga melibatkan oknum dari pihak kesatuan pengelola hutan (KPH) kabupaten Gowa yang berujung pada tertangkapnya pelaku yang menyuruh masyarakat masuk dalam kawasan hutan untuk dirambah dan memberikan pelegalan berupa sertifikat lahan yang di rambah serta membuka bagi masyarakat baik lokal mau pun luar Tombolo Pao untuk masuk mematok dan merambah Hutan, hal demikian mengundang kecaman dari pemuda di Kecamatan Tombolo Pao karna dari pihak salah satu oknum dari (KPH) kabupaten Gowa melakukan pembiaran untuk

masuk dalam kawasan untuk merambah hutan, yang nantinya akan berdampak langsung bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut.

Status hutan di kawasan hutan Tombolo Pao syarat akan adanya korporasi. Khususnya kasus hutan di kecamatan Tombolo Pao, berdasarkan hasil dengar pendapat antara pihak pemuda, pemerintah kecamatan dengan kepala kesatuan pengelola kehutanan (KPH) Kabupataen Gowa Andi Tonra, pemerintah kecamatan dan pemuda menemukan kejanggalan atas status lahan hutan, seperti kepala (KPH) kabupaten Gowa mempunyai lahan produksi hutan yang di obrasikan di desa Erelembang yang mengatas namakan masyarakat setempat untuk mendapatkan keuntungan dari lahan hutan di Tombolo Pao seperti getah pinus, yang secara massif serta tidak melakukan prosedural penggarapan getah pinus yang berakibat banyaknya pohon pinus yang tumbang ketika musim hujan.

Hal ini di ungkap oleh Ketua KNPI Tombolo Pao Afandi yang melalui rapat pendapat (RDP) yang di fasiliatasi oleh anggota DPRD kabupaten Gowa.<sup>75</sup>

Berdasarkan kronologi diatas memicu polemik di tengah masyarakat seperti stutus hutan dan status Reforma agraria (TORA) dikecamatan Tombolo Pao yang syarat akan kepentingan kuasa lahan hutan di kecamatan Tombolo Pao oleh oknum tak bertanggung jawab.

---

<sup>75</sup> Afandi (29 Tahun), *Tokoh Pemuda*, di rumah narasumber tombolo Pao, (12 Januari 2021).

Dalam penanganan kasus perambahan lahan hutan di kecamatan Tombolo Pao, pemerintah kecamatan bersama pemuda, mengusulkan kepada pemerintah kabupaten Gowa untuk mengadakan rapat dengar pendapat (RDP), antara pihak pemerintah kecamatan Tombolo Pao, pihak kesatuan pengelola hutan (KPH) Kabupaten Gowa serta dari pihak kepolisian, yakni sebagai wadah untuk mendengar aspirasi masyarakat terkait proses perambahan hutan di Kecamatan Tombolo Pao, untuk memecah permasalahan yang terjadi terkait perambahan hutan agar mendapatkan titik terang. Usulan ini ditrespon langsung oleh pemerintah kabupaten Gowa yang difasilitasi oleh DPRD kabupaten Gowa,

Benar pemerintah kecamatan bersama pemuda sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) antara pihak pemerintah kecamatan dengan kesatuan pengelola hutan (KPH) kabupaten Gowa, dan pemerintah kecamatan sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian kabupaten Gowa untuk menindak tegas pelaku yang ingin merambah hutan, yang bukan hak miliknya.” Astan Pagessa PLT Camat Tombolo Pao”.<sup>76</sup>

Pada polemik permasalahan perambahan hutan di kecamatan Tombolo Pao, menghasilkan ditangkapnya salah seorang warga yang telah terbukti merambah hutan serta di mutasinya kepala kesatuan pengelola hutan (KPH) Kabupaten Gowa melalui rapat dengar pendapat karena prosedural cara menyadap pinus serta banyaknya pengaduan dimasyarakat terkait permasalahan yang terjadi khususnya hutan di kecamatan Tombolo Pao. Ujarnya.

---

<sup>76</sup> Astan Pagessa (37 Tahun), *PLT Camat Tombolo Pao*, di kantor Camat Tombolo Pao, (01 Januari 2021).

Dengan ditangkapnya salah satu onum masyarakat yang merambah hutan serta dimutasinya kepala kesatuan pengelolah hutan (RPH) kabupaten Gowa, akibat prosedural penyadapa getah pinus serta banyaknya aduan masyarakat khususnya permasalahan di kawasan hutan di kecamatan Tombolo Pao menambah garis permasalahan kasus reforma agrarian, dan oknum yang terlibatpun pada kenyataan dilapangan adalah orang-orang yang berkapasitas dirana hutan, sehingga eksklusi atas lahan hutan merupakan suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan di negara ini, melihat permasalahan atas reforma agraria yang tak kunjung usai, belum lagi permasalahan lain atas pembebasan lahan hutan di daerah lain, yang tidak menutup kemungkinan hal demikian juga terjadi ketika para penentu kebijakan salah dalam mengambil peran serta tidak mengablikasikan aturan secara maksimal, yang efeknya tentunya bagi masyarakat yang kurang paham serta tidak tahu persoalan yang ditimbulkan oleh kebijakan yang sarat akan kepentingan untuk mendapat hasil keuntungan dari kebijakan tersebut.

Dalam melihat kasus perambahan hutan dan pembebasan lahan hutan dikecamatan Tombolo Pao kuasa eksklusi sangat nampak melihat beberapa aktor yang terlibat dilapangan seperti dimutasinya kepala kesatuan pengelolah hutan (KPH) kabupaten Gowa dan tertangkapnya salah satu masyarakat akibat perambahan hutan, sehingga dalam menganalisis kasus tersebut sarat akan tindak adanya eksklusi atas hutan yang terstruktur dari aparat yang tidak bertanggung jawab.

## **F. Polarisasi Dampak Sosial Eksklusi Pembebasan Lahan Hutan Di Kecamatan Tombolo Pao.**

Dampak merupakan suatu kerusakan yang berefek langsung bagi masyarakat, hal tersebut tentunya disebabkan oleh manusia yang takbertanggungjawab, yang ingin mendapatkan suatu manfaat dari objek yang terdampak, seperti halnya pada kasus pembebasan lahan dan perambahan hutan di Kecamatan Tombolo Pao, tentunya kasus tersebut mengalami dampak langsung baik bagi lingkungan ataupun masyarakat.

Permasalahan dampak sosial eksklusi atas pembebasan lahan hutan dan perambahan hutan di Tombolo Pao, sudah mulai berdampak ditengah masyarakat, yang mana berdampak langsung terutama hubungan masyarakat setempat dan masyarakat luar kecamatan Tombolo pao yang berakibat adanya konflik horizontal, dilain sisi pada hal sumber daya alam khususnya di air, juga mengalami dampak langsung ditengah masyarakat dimana pengairan air baik di sungai Tanggara dan sungai kecil yang berada di kecamatan tombolo Pao mengalami penurunan debit air pada saat musim kemarau hal ini mengakibatkan petani merasa resah, karna pengairan tersebut menjadi penopang para petani untuk mengairi sawah dan sayurannya, selain itu ekosistem didalam kawasan pembebasan dan perambahan hutan baik hewan dan tumbuhan obat juga terganggu akibat aktivitas tersebut.

Pembebasan dan perambahan hutan tersebut disebabkan karena adanya pembebasan lahan secara massif yang melibatkan sebagian masyarakat di kecamatan

Tombolo Pao, serta perambahan hutan yang dilakukan oleh salah satu oknum dari masyarakat luar yang dilakukan secara terstruktur, dengan memasuki kawasan hutan untuk merambah lahan hutan dengan mengatasnamakan lahan yang termasuk dalam kawasan reforma agrarian, sehingga berdampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut menuai reaksi dimasyarakat akibat yang ditimbulkan oleh pembebasan lahan dan perambahan hutan karna berdampak langsung bagi masyarakat setempat khususnya pada sector pertanian.

### **1. Dampak Pembebasan Lahan Hutan**

Kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk terwujudnya optimalisasi dan manfaat fungsi kawasan hutan secara lestari dan berkesinambungan. Prosedur dan mekanismenya dilakukan secara bertahap dimana sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terutama terhadap masyarakat yang berada di sekitar atau di dalam kawasan yang akan mengalami perubahan. Perubahan kawasan hutan adalah suatu proses perubahan terhadap suatu kawasan hutan tertentu menjadi bukan kawasan hutan atau menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutan lainnya. Departemen Kehutanan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dan menekan laju eksploitasi hutan dengan menerapkan moratorium konversi hutan alam. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/KPTS-II/2001 tentang penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan penetapan kawasan hutan, perubahan status kawasan hutan

dan perubahan fungsi kawasan hutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku<sup>77</sup>

Sebagai fungsi konservasi keberadaan dan kondisi hutan mempengaruhi terhadap pengawetan keanekaragaman flora-faun dan ekosistemnya. Dengan fungsi lindung hutan berperan dalam perlindungan dan penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sebagai fungsi produksi hutan merupakan penyedia hasil hutan yang dapat dimanfaatkan baik oleh masyarakat sekitar maupun kalangan tertentu, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berhak, Kawasan hutan juga memiliki nilai politis terkait dengan penguasaan dan atau pemilikan kawasan.<sup>78</sup> Penetapan suatu kawasan hutan dalam fungsinya yang spesifik, baik itu untuk fungsi konservasi, lindung maupun produksi, memiliki konsekuensi yang berbedabeda. Khusus di kawasan hutan dengan fungsi produksi, keterlibatan manusia di dalamnya jauh lebih intensif dibandingkan dengan kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi. Perubahan fungsi kawasan hutan dari yang sebelumnya memiliki fungsi produksi menjadi kawasan hutan dengan fungsi lain akan berdampak pada hajat hidup orang banyak yang sebelumnya telah beraktivitas di dalamnya. Di samping pertimbangan biofisik dan dampak yang terjadi.

---

<sup>77</sup> Anonim. *"Hutan Taman Nasional Sebangau"* 2007.

<sup>78</sup> Silviani, *"Kajian Dampak Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Terhadap masyarakat Sekitar"* jurnal (semarang : universitas Negeri Semarang, 2016).

lingkungan perubahan fungsi tersebut harus melalui penilaian matang untuk menghindari timbulnya kerugian dan potensi konflik di masa mendatang. Hingga telah terjadi perubahan fungsi hutan pembebasan menjadi kawasan hutan seperti halnya fungsi hutan Negara menjadi hutan pembebasan lahan reforma agrarian di kecamatan Tombolo Pao yang secara data seluas lahan pembebasan yang dibebaskan 457,58 untuk di manfaatkan menjadi lahan garapan untuk masyarakat.

Pembebasan lahan hutan di Kecamatan Tombolo Pao, khususnya di desa Tonasa dan Kelurahan Tamaona, memberikan dampak perubahan langsung dimasyarakat sekitar. Berdasarkan hasil dilapangan, Sejauh ini terhadap aspek lingkungan yaitu intensitas kerusakan terhadap kawasan hutan pembebasan mengalami ancaman terhadap longsor dan kurangnya pasokan air pada saat kemarau, masyarakat di desa Tonasa dan kelurahan Tamaona beberapa kali melihat kegiatan eksploitasi dan penebangan liar/pembalakan khususnya di wilayah desa dan kelurahan tersebut diduga berlangsung intens bahkan melibatkan masyarakat karena akses menuju kawasan tersebut terbuka untuk masuk merambah hutan.

Dilain sisi gambaran dampak atas pembebasan lahan hutan khususnya hutan di Kecamatan Tombolo Pao, menimbulkan efek terganggunya siklus air ketika musim kemarau hal ini bisa kita temuai ketika musim kemarau yang banyaknya masyarakat merasakan dampak yakni kurangnya debit air di salah satu sungai seperti sungai Tanggara yang mana sungai tersebut adalah salah sat sumber air terbesar dikecamatan Tombolo Pao, adapun sungai yang lain kita bisa temuai adanya kekeringan sungai



kecil yang ada di kecamatan Tombolo Pao hal ini menyebabkan kerugian terkhususnya bagi para petani karna sember untuk penghidupan tanaman baik padi dan sayuran dan tanaman lain bersumber dari sungai tersebut.

Keberagaman flora dan fauna yang ada hutan kecamatan Tombolo Pao secara tidak langsung memberikan efek atas pembebasan lahan hutan tersebut yakni hilangnya habitat berbagai jenis spesies yang tinggal di dalam hutan. Seperti tanaman dan hewan yang hidup di hutan, mengakibatkan mereka tidak bisa bertahan hidup disana. Diakibatkan masyarakat beraktivitas dilahan hutan tersebut serta mengganggu habitat seperti kera hutan dan rusa hutan yang mana dulu sebelum adanya perambahan hutan dikecamatan Tombolo Pao, kera dan rusa bisa kita temui di pedalaman hutan, hal sekarang berbanding terbalik yakni sangat jarang kita lihat hewan tersebut di sebabkan habitatnya diganggu, Belum lagi tanaman herbal obat yang biasa nenek moyang pake untuk mengobati penyakit, seperti asma, obat patah tulang, obat panas dingin dll,

Hal diatas kini jarang sekali kita temui tumbuhan obat tersebut yang hal demikian sangat merugikan dengan hilangnya habitat-habitat tersebut, dan tidak menutup kemungkinan generasi yang akan datang tidak lagi melihat hewan dan tumbuhan didalam hutan. Ujarnya Seha<sup>79</sup>

Belum lagi dampak yang terjadi atas pembebasan lahan hutan di kecamatan Tombolo Pao, yang biasa kita lihat pada saat musim kemarau yang berdampak langsung bagi para petani sayuran didesa Tonasa dan Kelurahan Tamaona, jika kita melihat pada musim kemarau tiba, para petani setiap malam menjaga air, untuk

---

<sup>79</sup> Seha (52 Tahun), *Masyarakat, di rumah narasumber tombolo Pao*, (10 Desember 2020).

pengairan baik padi ataupun sayuran lain, hal ini karna debit air disungai pengaliran sawah sangat kecil dan setiap harinya air tersebut digilir sesuai jumlah petani yang mempunyai lahan garapan.

Eksklusi dari dampak lahan dikecamatan Tombolo Pao, berkaitan erat dengan ketidak pahaman masyarakat sekitar. Dimana lahan atau tanah bukan saja sebagai sumber penghidupan tetapi dalam arti luas juga merupakan sumber integrasi. Hubungan antara eksklusi dan akses pada tanah bahkan juga pada lingkungan dengan tanah yang luas. Salah satu penyebabnya menurunnya lahan produktif yang tersedia dikecamatan Tombolo Pao.

Dilain sisi lain efek dari maraknya pembebasan lahan dan perambahan hutan berakibat masyarakat khususnya di desa Kanreapia, membuat sumur bor dan tempat penampungan air yang kalau kita lihat daerah tersebut adalah daerah dataran tinggi, hal ini terjadi karna hilangnya daya serap tanah, dan semakin berkurangnya pohon yang bertindak sebagai tempat penyimpan cadangan air tanah sehingga berdampak pada msayarakat untuk membuat penampungan air dan sumur bor. Hal ini menjadi tontonan pilu, sebab kecamatan Tombolo Pao adalah salah satu daerah didataran tinggi Gowa sebagai pusat sentral sayuran serta menjadi penghasilan masyarakat, serta menjadi pemasok sayur terbesar kabupaten Gowa serta kota Makassar.

Dimana ketika perambahan dan pembebasan lahan semakin terjadi efeknyapun akan berdampak langsung bagi lingkungan dan tidak menutup

kemungkinan, dibidang ekonomi khususnya penghasilan petani di dekat kawasan hutan akan mengalami kerugian akibat dari pasokan air yang kurang untuk di pake para petani untuk menyiram tanaman sayur-sayuran, belum lagi konsumsi air minum masyarakat Tombolo Pao, sangat bergantung pada sungai yang berada di hulu hutan, jika hal perambahan hutan terus terjadi tidak menutup kemungkinan yang akan datang, masyarakat akan kesusahan air untuk kebutuhan sehari-hari.

#### **b. Dampak Eksklusi Sosial di masyarakat**

Eksklusi sosial juga tidak terlepas dari menurunnya kemampuan dan peran negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Seperti dikatakan Silver (1995) sejak pertengahan tahun 1970an negara-negara maju yang menganut sistem demokrasi kapitalis telah mengalami perubahan ekonomi secara mendasar. Salah satu akibat dari perubahan ini adalah munculnya berbagai masalah sosial baru yang menggugat asumsi dasar negara negara barat sebagai negara kesejahteraan, Pola peningkatan karir, struktur hubungan keluarga dan standar kehidupan yang selama ini bisa terjamin kepastiannya sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Semakin banyak orang yang mengalami perasaan tidak aman dan menjadi tergantung pada program perlindungan sosial yang tidak pasti atau bahkan tanpa penjaminan sosial sama sekali.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Daly, Mary dan Hilary Silver. 2008. *"Social Exclusion and Social Capital: A Comparison and Critique"*, jurnal (USA: Brown University Vol. 37: 537–566, 2018)

Dalam melihat problem dampak permasalahan social dimasyarakat kecamatan Tombolo Pao pada dasarnya berakar pada permasalahan lahan pembebasan hutan khususnya di Desa Tonasa dan Kelurahan Tamaona yang berdampak langsung, konflik lahan pembebasan berdampak pada tatanan social hidup bermasyarakat dimana kondisi ini memicu maraknya penolakan baik di lakukan oleh pemuda dan masyarakat, penolakan berupa aksi dimedia cetak yang merilis berita penolak pembebasan lahan hutan di kecamatan tombolo Pao karna menuai banyak persoalan ditengah masyarakat.

Eksklusi dari lahan dikecamatan Tombolo Pao, berkaitan erat dengan ketidak pahaman masyarakat sekitar. Dimana lahan atau tanah bukan saja sebagai sumber penghidupan tetapi dalam arti luas juga merupakan sumber integrasi. Hubungan antara eksklusi dan akses pada tanah bahkan ditemukan juga pada lingkungan dengan tanah yang luas. Salah satu penyebab adalah menurunnya lahan produktif yang tersedia bagi sejumlah besar penduduk perdesaan, baik karena menurunnya kesuburan atau karena kepemilikan lahan berpindah ke tangan sejumlah kecil individu atau perusahaan. Intervensi

pemerintah seringkali bukannya mengurangi eksklusi malahan semakin menambahnya karena dalam pelaksanaan intervensi yang dilakukan bahkan semakin

mengusur penduduk setempat demi kepentingan para pengusaha hutan atau pengembangan lokasi wisata.<sup>81</sup>

Berdasarkan dampak eksklusi social dimasyarakat berhungan erat ketidak harmonisan masyarakat sekitar antar desa diakibatkan karna orang luar desa tonasa masuk untuk kelokasih hutan pembebasan untuk mendapatkan lahan pembebasan hal ini berakibat adanya penolakan warga lokal disekitaran desa Tonasa karna menurutnya lahan hutan tersebut adalah warisan dari nenek moyang mereka dan mengklaim bahwa daerah yang dijadikan lahan pembebasan oleh pemerintah kabupaten Gowa, yang harus jatuh pada warga didaerah tersebut, akibat dari adanya hal seperti ini memicu adanya pro dan kontra di masyarakat menyebabkan adanya perselisihan dan bahkan sempat terjadi konflik harisontal antara masyarakat local desa Tonasa yang bermukim di daerah lahan pembebasan tersebut dengan masyarakat luar daerah desa Tonasa, dengan kejadian di usir paksa warga masyarakat orang luar esa Tonasa dengan memakai senjata tajam seperti parang, cangkul, badi dan kayu yang mau masuk merambah serta mendapatkan lahan pembebasan didaerah tersebut.

disisi lain kejadian dampak social juga terjadi di kelurahan Tamaona yang mana berdasarkan temuan dan wawancara dilapangan menemukan bahwa akar permasalahan dari dampak social yang mengakibatkan ketidak harmonisan antar

---

81 Rusydi Syahra, *"Teori Dampak Eksklusi"* Jurnal, (Bogor: Intutut pertanian bogor. 2010).

warga masyarakat di kecamatan Tombolo Pao khususnya antar masyarakat di kelurahan Tamaona seperti yang di ungkapkan oleh Tokoh masyarakat

Misbahuddin “hampir masyarakat mau naik ke lokasi lahan pembebasan untuk mengusir warga yang mau menggarap dan merusak hutan”<sup>82</sup>

karna menurutnya akan merusak ekosistem air pada saat musim kemarau jika di lihat dari tahun-tahun lalu banyak warga di kelurah Tamaona yang mengeluh akibat kurangnya pasokan air untuk pengairan sawah, dan sayur hal ini karna diakibatkan adanya perambahan hutan di hulu sungai yang menurut warga berakibat pada petani diderah bawah khususnya di kelurahan tamaona mengalami stok air yang kurang.

Pada dasarnya eksklusi social dimasyarakat Tombolo Pao terjadi semenjak adanya Pembebasan lahan yang menyebabkan ketidak harmonisan antar masyarakat, karna adanya ketidak adilan, yang tidak mendapatkan lahan hutan pembebasan untuk digarap, ada juga ingin mempertahankan kondisi hutan untuk generasi yang akan datang melihat ekosistem air, selain itu akar permasalahannya yakni warga masyarakat lokal khusus di desa Tonasa dan kelurahan Tamaona tidak mau ketika warga masyarakat luar masuk untuk mendapatkan lahan pembebasan dan merambah hutan, yang tidak sesuai dengan prosedural aturan yang berlaku.

---

<sup>82</sup> Misbahuddin (66 Tahun), *Tokoh Masyarakat, di rumah narasumber Tombolo Pao*, (11 Desember 2020).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Relasi kuasa dalam Kasus Pembebasan Lahan Hutan dibangun untuk mendukung penerapan strategi pertanahan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, Yang merujuk pada nyawa Cita Jokowi-Amin dibidang Pertanahan Yakni Reforma Agraria, yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Strategi ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki lahan baik hunian, dan garapan lahan, dengan asa berupa keadilan, kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan.

Penelitian ini dapat mengambil beberapa kesimpulan yang terurai di bawah ini:

1. kuasa Eksklusi di Kecamatan Tombolo Pao menunjukkan ketimpangan relasi kuasa yang melahirkan eksklusi sosial dan resistensi di tengah-tengah masyarakat. Eksklusi yang terjadi pada masyarakat dikecamatan Tombolo Pao, meliputi beberapa sektor, mulai dari masih simpansiurnya lahan TORA di Kecamatan Tombolo Pao serta akses lahan, hak untuk mengetahui kebijakan pemerintahan Kecamatan atas pembagian lahan hutan, pembagian lahan kurang mengikuti prosedural yang berlaku, sarat tindak relasi kuasa eksklusi yang terstruktur, Ditambah adanya perambahan hutan yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan di tengah masyarakat khususnya di

Desa Tonasa dan Kelurahan Tamaona yang diduga melibatkan oknum diantaranya salah satu warga dari kecamatan Tinggimoncong, oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta oknum dari pihak kesatuan pengelola hutan (KPH) kabupaten Gowa, hal ini terjadi kurangnya kontrol sosial dan antisipasi awal dari pemerintah kecamatan Tombolo Pao, serta lebih luas sikap parsialitas pemuda khususnya di dalam pembebasan lahan, ternyata memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap eksklusi pembebasan lahan dan eksklusi sosial yang terjadi.

2. Kasus Pembebasan lahan hutan yang terjadi, menimbulkan dampak langsung di masyarakat seperti dampak lingkungan yang semakin hari semakin memprihatinkan, seperti pasokan sungai ketika musim kemarau mengalami penurunan debit air diantaranya sungai Tanggara, Allu dan beberapa sungai kecil di Kecamatan Tombolo Pao, dampak lain ekosistem habitat flora dan fauna yang berada dalam hutan terganggu serta renggangnya hubungan social masyarakat.



## **B. Saran**

Setelah melihat persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Tombolo Pao, Kasus Pembebasan Lahan hutan dapat dikikis jika ketimpangan kuasa eksklusi dapat dikurangi. Untuk mengurangi ketimpangan eksklusi, jika tidak mau dikatakan menghapus ketimpangan eksklusi sosial karena hal ini adalah bagian dari entitas kekuasaan, maka penulis dapat menyarankan beberapa hal yang bisa diupayakan:

1. Mengoptimalkan sistem demokrasi seperti yang telah diyakini oleh negara kita Republik Indonesia. Jika demokrasi mampu diaktualisasikan sebagaimana fungsinya yakni, untuk memilih sekaligus melahirkan pemimpin yang ideal dan populis bagi masyarakat, ketimpangan relasi kuasa yang mendorong untuk melahirkan eksklusi sosial akan dapat diminimalisir bahkan dapat dihapuskan.
2. Eksistensi figur pemerintah sebagai aktor yang dapat menciptakan dinamika sosial di tengah-tengah masyarakat harus netral dan tidak bersikap parsial, khususnya di dalam sektor penguasaan lahan pembebasan dan perambahan hutan
3. Peran tokoh masyarakat dan pemuda yang dipandang sebagai aktor penuh perhatian lebih, sangat diharapkan sebagai bias mengontrol permasalahan yang terjadi di daerahnya, serta dapat meminimalisir segala bentuk eksklusi sosial yang dipicu oleh ketimpangan relas kuasa.

4. Kemudian untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan mengambil tema tentang kuasa eksklusif Pertanahan, hendaknya melakukan indepth interview dengan semua elemen baik pemerintah, tokoh agama, pemuda dan masyarakat yang pernah menjadi penggerak utama kasus pembebasan lahan hutan dikecamatan tombolo Pao, sebab dengan demikian langkah-langkah kebijakan yang diambil, yang menjadi dasar penting terciptanya kesejahteraan masyarakat akan dapat dibaca dengan maksimal, karna secara langsung di dalam penelitian ini masih ada beberapa kendala yang tidak bias dihindari

### Daftar pustaka

- Afandi (29 Tahun), *Tokoh Pemuda*, di rumah narasumber tombolo Pao, 12 Januari 2021.
- Afrizal, *Menganalisis Dampak Sosial Pembangunan*, Jurnal Universitas Andalas, 2008.
- Agama Kementrian, *Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahannya Disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat*, Jakarta: Darus Sunnah.
- Al-Qur'an al-Karim
- Anonim. "*Hutan Taman Nasional Sebangau*" 2007.
- Buckle A.K, *Ilmu Pangan*, Surabaya:UIP 2020..
- Creswell W John, *Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2012.
- Gowa Kabupaten Pemerintah, "*Peta Administrasi Kabupaten Gowa*", <https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/01/administrasi-gowa-a1-1.jpg>, 26 februari 2021.
- Grieco, M Joseph, *Cooperation Among Nations: Europe, America, and Non-Tariff Barriers to Trade*, Cornell University Press.
- Gulo W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Grasindo, 2002.
- Hasma, "Ekonomi Regional" *Program Tora Kab.Gowa*", 06 februari 2020.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- Latif Yudi, *Intelegensia Muslim Dan Kuasa; Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Luthfi Nashih Ahmad , "*Eksklusi dan Inklusi Sebagai Dua Sisi Mata Uang* ", Jurnal Bhumi, 2013.
- Martin Roderick, *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Misbahuddin (66 Tahun), *Tokoh Masyarakat*, di rumah narasumber Tombolo Pao, 11 Desember 2020.
- Moleong J Lely, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya 2017.
- Nurdin M. Fadhil, *Eksklusi Sosial Dan Pembangunan*, Manado: Universitas Padjadjaran.
- Pagessa Astan, (37 Tahun), *PLT Camat Tombolo Pao*, di kantor Camat Tombolo Pao, 01 Januari 2021.

- Penulis Korespondensi: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor Kampus IPB Dramaga, Jalan Kamper, Babakan, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.
- Pierson Jhon P, *Tackling Social Exclusion*, London and New York: Routledge, 2002.
- Pratama Arya, *Setkab Perpres No 86 2018*, Tanah Objek Reforma agrarian, 2018.
- R.I Pemerintah Peraturan, No. 104 Tahun 2015, *Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan*, Pasal 1 angka 13 dan angka 14.
- Rahman, "Ekonomi Regional", <http://rahman-jaya.blogspot.co.id/2012/03/skripsi-ekonomi-regional.html> 27 November 2016.
- Ricka O, & Isna Fitria, *Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi*, jurnal, universitas muhammadiyah sudiarjo 2016.
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Seha (52 Tahun), *Masyarakat, di rumah narasumber tombolo Pao*, 10 Desember 2020.
- Silver Hilary dan Daly, 2008. "Social Exclusion and Social Capital: A Comparison and Critique", jurnal USA: Brown University Vol. 37: 537–566, 2018.
- Silviani, "Kajian Dampak Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Terhadap masyarakat Sekitar" jurnal, Semarang : universitas Negeri Semarang, 2016.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suyanto Siswanto, *Metode Penelitian Kombinasi, Kualitatif & Kuantitatif Pada Penelitian Tindakan (PTK & PTS)*, Boss Script, Klaten Selatan, 2017.
- Tania Murray Li, Philip Hirsch & Derek Hall, *Kuasa eksklusif, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, Yogyakarta: INSIST Press, 2020.
- Utama S Andre, "Review" *Social Exclusion: a Concept in Need of Definition*. Robin Peace, *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol.2 No.1 Februari 2011.

## Lampiran-Lampiran.

### Lampiran 1 : Izin Penelitian




1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 9 9 1 7

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

---

Nomor : 9373/S.01/PTSP/2020  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Bupati Gowa

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3781/FUF/PP.00.9/11/2020 tanggal 10 November 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : ALDISYAH  
 Nomor Pokok : 30600115051  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

\* KUASA EKSKLUSI ATAS TANAH DI KABUPATEN GOWA (ANALISIS KASUS PEMBEBASAN LAHAN DI KECAMATAN TOMBOLO PAO) \*

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 14 November 2020 s/d 14 Januari 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 14 November 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI  
 SULAWESI SELATAN Selaku Administrator Pelayanan Perizinan  
 Terpadu

  
Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
 1. Dekan Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
 2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 14-12-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231



## Lampiran 2 : Rekomendasi Penelitian.



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 12 November  
2020

K e p a d a

Nomor : 503/911/DPM-  
PTSP/PENELITIAN/11/2020  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Camat Tombolo Pao  
Di -  
Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sul-Sel Nomor :  
9373/S.01/PTSP/2020 tanggal 14 November 2020 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **ALDISYAH**  
Tempat/Tanggal : Tombolo / 19 Juni  
Lahir : 1997  
Nomor Pokok : 30600115051  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Program Studi : Ilmu Politik  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Ance Dg.Ngoyo

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"KUASA EKSKLUSI ATAS TANAH DI KABUPATEN GOWA ( ANALIS KASUS PEMBEBASAN LAHAN DI KECAMATAN TOMBOLO PAO )"**

Selama : 14 November 2020 s/d 14 Januari 2021  
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
a.n. BUPATI GOWA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
N : 19721026 199303 1  
Nip : 003

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Gowa ( Sebagai Laporan )  
2. Dekan Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
3. Yang bersangkutan;  
4. Peringgal,-

### Lampiran 3 : Daftar pertanyaan

1. Bisakah bapak menceritakan masalah pembebasan lahan hutan di kabupaten Gowa?
2. Bisakah bapak menceritakan peristiwa Perambahan lahan Hutan di kecamatan Tombolo Pao, yang melibatkan Masyarakat sekitar , dan Pihak terkait apakah itu bagian dari dampak Revorma Agraria “TORA”?
3. pendapat bapak tentang perambahan hutan yang terjadi di Kecamatan Tombolo Pao, ?
4. Bagaimana perubahan suhu masyarakat setelah adanya pembagian lahan dan perambahan hutan ditengah masyarakat?
5. Bisa kita ceritakan kembali permasalahan yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Tombolo Pao yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan ditengah masyarakat.?
6. Apa yang menyebabkan kegaduhan dalam masyarakat apakah ini murni karena kekecewaan pada Perambahan hutan atau ada hal lain?
7. Apa dampak social baik lingkungan dan masyarakat terhadap pembebasan lahan dan perambahan hutan?
8. Apakah dampaknya sangat berpengaruh dimasyarakat?
9. Apakah Bapak mengetahui actor dari perambahan hutan di kecamatan Tombolo Pao?
10. Menurut Bapak Apakah dalam pembebasan lahan dan perambahan hutan di kecamatan Tombolo Pao ada indikasi permainan ASN dalam pembagian lahan?
11. Bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam menangani kegaduhan sosial politik yang menyebabkan keharmonisan hilang dalam masyarakat.?

12. Bagaimana peran Pemuda dalam melihat fenomena di masyarakat di Kecamatan tombolo pao.?



Lampiran 4 : Foto yang mendukung Penelitian

1. Lahan hutan pinus (TORA) yang sudah ditanami tanaman kopi



2. Lahan hutan pinus (TORA) yang ditanami sayur-sayuran







### 3. Perambahan hutan di desa Tonasa





Lampiran 5 : Resistensi Pemerintah, Masyarakat Dan Pemuda.

1. Aksi Media Penolakan Masyarakat dan Pemuda Atas Perambahan Hutan

NEWS

**“Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Tombolopao : Kasus Pengrusakan dan Perambahan Hutan harus Segera Dituntaskan”**



2. Aksi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di fasilitasi Oleh DPRD Kab. Gowa Terkait Pengrusakan Hutan Pinus Di Kec. Tombolo Pao.



## Lampiran 6 : Documentasi wawancara

### 1. Wawancara bersama bapak Astan Pagessa ( PLT Camat Tombolo Pao)



### 2. Wawancara bersama Afandi ( Ketua DPK KNPI Tombolo Pao)



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Aldisyah**, lahir di Tombolo Pao, 19 Juni 1997, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan anak ke enam dari pasangan Aminuddi dengan Aisyah.

Pendidikan formal, Sekolah Dasar di SD Inpres Tombolo, pada tahun 2003 sampai tahun 2008, melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMP Negeri 1 Tombolo Pao pada tahun 2008 sampai tahun 2012, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tombolo Pao dengan mengambil Jurusan IPA pada tahun 2012 sampai tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan mengambil Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik pada tahun 2015 sampai tahun 2021.

Pengalaman organisasi penulis yaitu: menjadi salah satu kader Kelompok Pecinta Alam (GENHTAPALA) 2016-2017, Forum Kajian Mahasiswa Dataran Tinggi 2017-2019, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin, Filsafat dan Politik 2017-2019, Himpunan Pelajar Mahasiswa Gowa (HIPMA GOWA) 2017-2019, Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL) 2017-2018, KSR PMI UIN Alauddin Makassar 2017-2018, SAPMA Pemuda Pancasila UIN Alauddin Makassar 2017-2018, Jaringan Aktivis Filsafat Islam 2018, Ikatan Pelajar Mahasiswa (IPMAH TAMAONA) 2019-2020, DPK KNPI Tombolo Pao 2019-2021, Karang Taruna Kelurahan Tamaona, dan menjadi bagian dari anggota Organisasi Laskar Merah Putih (LMP) Kecamatan Tombolo Pao.